

**PENGARUH HAK PERLINDUNGAN BAGI
WHISTLEBLOWER TERHADAP NIAT UNTUK
MELAPORKAN FRAUD**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dewi Setyowatiningsih

No. Mahasiswa : 13312204

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGARUH HAK PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*
TERHADAP NIAT UNTUK MELAPORKAN *FRAUD***

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Dewi Setyowatiningsih

No. Mahasiswa: 13312204

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 31 Agustus 2017

Penulis,



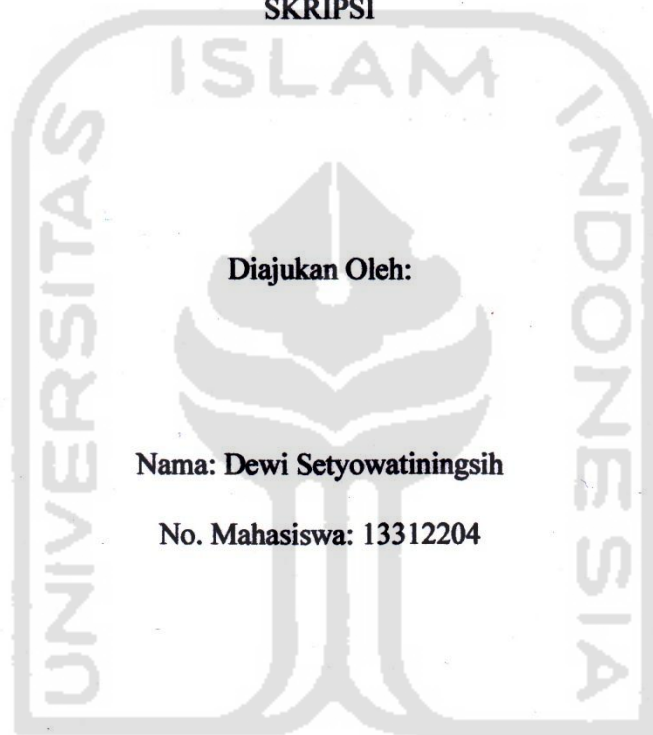
(Dewi Setyowatiningsih)

HALAMAN PENGESAHAN

Bahwa Penelitian yang Berjudul

**PENGARUH HAK PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*
TERHADAP NIAT UNTUK MELAPORKAN *FRAUD***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama: Dewi Setyowatiningsih

No. Mahasiswa: 13312204

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 31 Agustus 2017

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kumalahadi', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

(Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH HAK PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER TERHADAP NIAT
UNTUK MELAPORKAN FRAUD**

Disusun Oleh : **DEWI SETYOWATININGSIH**

Nomor Mahasiswa : **13312204**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 Oktober 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Kumala Hadi, Dr., MS, Ak.,CPA.

Penguji : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insyiraah/94: 6-8)





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud***”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Akuntansi pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini dapat tersusun baik berkat bantuan, dorongan, bimbingan serta kerja sama dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si, MCom(IS), PhD, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA., Ak. selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan ketulusan selalu memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini..
5. Para dosen Prodi Akuntansi yang telah memberikan berjuta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Almarhum Ayah J Sutarno yang secara tidak langsung selalu memotivasi

penulis dan Ibu Nanik Winarni yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya yang sangat luarbiasa.

7. Kakak tercinta Endah Setyaningsih dan Andi Prasetyo Wibowo yang telah menyemangati penulis dalam peulisan skripsi ini.
8. Geng Terwacana (Atriska, Upik, Diaz, Marwah) yang sudah banyak membantu dan selalu memberikan masukan serta mengingatkan untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini.
9. Geng Glundang-glundang (Hera, Linda, Azha) yang selalu saling mengingatkan skripsi.
10. Teman-temanku (Putri, Tika, Reni, Ify, Hesti, Ira) yang sudah banyak memberi masukan, saran serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan nikmat atas bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis, Amin. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca padaumumnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2017

Penulis

Dewi Setyowatiningsih

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3 TUJUAN PENELITIAN	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6

1.5 SISTEMATIKA BAHASA.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
2.1 KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	8
2.1.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	10
2.1.3 <i>Whistleblowing</i>	11
2.1.4 Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i>	13
2.1.5 Biaya Pribadi (<i>Personal Cost</i>)	14
2.1.6 Pengungkapan Identitas <i>Whistlebloer</i> ke <i>Hotline</i>	15
2.2 PENELITIAN TERDAHULU	16
2.3 HIPOTESIS PENELITIAN	17
2.3.1 Dampak Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	17
2.3.2 Dampak Pencantuman Identitas <i>Whistleblower</i> ke <i>Hotline</i> terhadap Niat untuk Pelaporkan <i>Fraud</i>	18
2.4 KERANGKA PENELITIAN	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 DESAIN PENELITIAN.....	21
3.1.1 Jenis Penelitian	21
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
3.2 POPULASI DAN SAMPEL	22
3.2.1 Populasi.....	22

3.2.2 Sampel	22
3.3 DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL.....	23
3.3.1 Variabel Dependen	23
3.3.2 Variabel Independen	23
3.4 PENGUMPULAN DATA EKSPERIMEN	24
3.5 DESAIN PENELITIAN.....	24
3.5.1 Dampak Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	25
3.5.2 Dampak Pencantuman Identitas <i>Whistleblower</i> ke <i>Hotline</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	25
3.5.3 Dampak Pencantuman Identitas dan Hak Perlindungan terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	26
3.6 HIPOTESIS OPERASIONAL.....	30
3.7 ALAT ANALISA DATA	31
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.7.2 Uji Validitas.....	31
3.7.3 Uji Reliabilitas	31
3.7.4 Pengecekan Manipulasi	32
3.7.5 Pengujian Hipotesis	32
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN EKSPERIMEN .	34
4.2 ANALISIS DATA	35
4.2.1 Hasil Pengumpulan Data	35

4.2.2 Analisis Deskriptif Responden	36
4.2.2.1 Angkatan	36
4.2.2.2 Jenis Kelamin.....	37
4.2.2.3 Usia	37
4.2.2.4 Lulus Pengauditan.....	38
4.2.2.5 Pengetahuan Dasar <i>Fraud</i> dan <i>Whistleblowing</i>	39
4.2.3 Uji Validitas	41
4.2.4 Uji Reliabilitas	42
4.2.5 Pengecekan Manipulasi	43
4.2.6 Pengujian Hipotesis	45
4.2.6.1 Pengujian Hipotesis 1	45
4.2.6.2 Pengujian Hipotesis 2a.....	46
4.2.6.3 Pengujian Hipotesis 2b	48
4.3 PEMBAHASAN	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 KESIMPULAN	51
5.2 SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

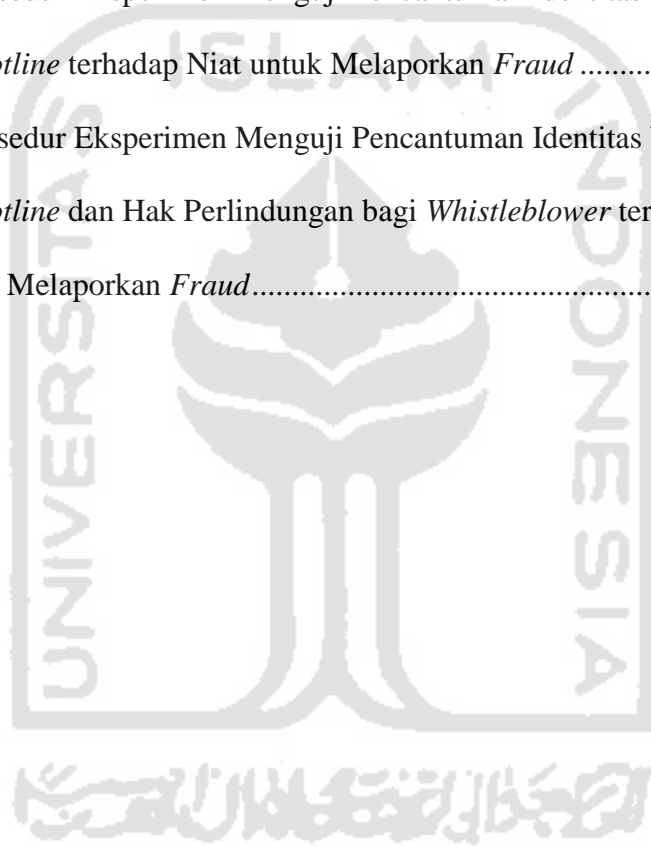
Tabel 3.1 Desain Penelitian Dampak Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	25
Tabel 3.2 Desain Penelitian Dampak Pencantuman Identitas <i>Whistleblower</i> ke <i>Hotline</i> Pelaporan terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	25
Tabel 3.3 Desain Penelitian Dampak Pencantuman Identitas <i>Whistleblower</i> ke <i>Hotline</i> dan Adanya Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> terhadap Niat Untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	26
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	35
Tabel 4.2 Karakteristik Partisipan Berdasarkan Angkatan	36
Tabel 4.3 Karakteristik Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.4 Karakteristik Partisipan Berdasarkan Usia	37
Tabel 4.5 Daftar Partisipan Lulus Pengauditan	38
Tabel 4.6 Tingkat Pemahaman terhadap Dasar Audit	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen 1 dan 2.....	41
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Instrumen 3 dan 4.....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Instrumen 5 dan 6.....	42
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
Tabel 4.11 Hasil Pengecekan Manipulasi	44

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis 1	46
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis 2a	47
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis 2b	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 3.1 Prosedur Eksperimen Menguji Hak Perlindungan terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	27
Gambar 3.2 Prosedur Eksperimen Menguji Pencantuman Identitas Whsitleblower ke <i>Hotline</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	28
Gambar 3.3 Prosedur Eksperimen Menguji Pencantuman Identitas Whsitleblower ke <i>Hotline</i> dan Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian Adanya Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i>	56
Lampiran 2 Instrumen Penelitian Tidak Adanya Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i>	60
Lampiran 3 Instrumen Penelitian Wajib Mencantumkan Identitas.....	64
Lampiran 4 Instrumen Penelitian Tidak Wajib Mencantumkan Identitas	68
Lampiran 5 Instrumen Penelitian Wajib Mencantumkan Identitas dan Ada Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i>	72
Lampiran 6 Instrumen Penelitian Wajib Mencantumkan Identitas dan Tidak Ada Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i>	76
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 1	80
Lampiran 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 2	82
Lampiran 9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 3	84
Lampiran 10 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 4	86
Lampiran 11 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 5	88
Lampiran 12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 6	90
Lampiran 13 Hasil Pengujian Paired Sampel T-Test Pengaruh Hak Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	92
Lampiran 14 Hasil Pengujian Paired Sampel T-Test Pengaruh Pencantuman Identitas <i>Whistleblower</i> ke <i>Hotline</i> terhadap Niat untuk Melaporkan <i>Fraud</i>	93

Lampiran 15 Hasil Pengujian Paired Sampel T-Test Pengaruh Pencantuman
Identitas *Whistleblower* ke *Hotline* dan Hak Perlindungan bagi
Whistleblower terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud* 94



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of identity and whistleblower protection on the intention to report fraud. With an experimental methodology for comparing the existing relationship and the absence of whistleblower protection rights, mandatory and non-mandatory inclusion of whistleblowers to the hotline, as well as identity inclusion obligations that obtain and are not entitled to protection of intent to report fraud. The sample in this study using 6 classes with the number of participants as many as 206 students. The instrument used is a case study of a problem that indicates the occurrence of fraud. The results indicate that the intention to report fraud will increase when the whistleblower gets the right to protection, the intention to report fraud will be reduced when the whistleblower is required to include the identity to the perlite hotline, and the intention to report fraud increases when the whistleblower is required to attach its identity to the hotline and obtain the right of protection for whistleblower.

Key words : *whitleblow, whistleblower, whistleblowing, fraud*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pencantuman identitas dan hak perlindungan *whistleblower* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Dengan metodologi eksperimen untuk membandingkan hubungan ada dan tidak adanya hak perlindungan bagi *whistleblower*, wajib dan tidak wajibnya pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline*, serta kewajiban pencantuman identitas yang mendapatkan dan tidak mendapatkan hak perlindungan terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 6 kelas dengan jumlah partisipan sebanyak 206 mahasiswa. Instrumen yang digunakan adalah studi kasus mengenai suatu masalah yang mengindikasikan terjadinya *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat untuk melaporkan *fraud* akan meningkat ketika *whistleblower* mendapatkan hak perlindungan, niat untuk melaporkan *fraud* akan berkurang ketika *whistleblower* diwajibkan untuk mencantumkan identitas ke *hotline* perlporan, serta niat untuk melaporkan *fraud* meningkat ketika *whistleblower* diwajibkan mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan bagi *whistleblower*.

Kata kunci : *whitleblow, whistleblower, whistleblowing, fraud*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam dunia bisnis, penyebab kerugian dari sebuah organisasi dapat berasal dari kecurangan. Pelaku-pelaku pelanggaran sendiri dapat berasal dari pihak internal organisasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal cenderung dilakukan oleh yang berkedudukan tinggi dalam sebuah organisasi, yang kemudian disebut sebagai “*white collar crime*”. Hal ini dikarenakan mereka telah banyak mengetahui seluk beluk dari organisasi itu sendiri. Pihak-pihak internal organisasi ini kemudian sebagai “*trust violator*” atau pelanggar kepercayaan, yaitu mereka yang melanggar kepercayaan yang dititipkan kepada mereka.

Salah satu skandal akuntansi yang melibatkan pihak yang berkedudukan tinggi dalam internal perusahaan yang menyita perhatian dunia adalah kasus Enron. Dalam kasus tersebut profesi akuntan terbukti menjadi salah satu kunci permasalahan. Enron melakukan manipulasi angka-angka dalam laporan keuangan (*window dressing*) agar kinerjanya tampak baik. *Window dressing* tersebut dilakukan dengan *me-mark up* pendapatan sebesar \$600 juta, dan menyembunyikan hutangnya dengan teknik *off-balance sheet* yang senilai \$1,2 miliar. Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen juga terbukti bersalah karena membantu merekayasa laporan keuangan Enron selama bertahun-tahun. Pada akhirnya kecurangan akuntansi tersebut dapat diungkapkan karena adanya laporan dari seorang *whistleblower* Enron yaitu Sherron Watskin.

Tuanakotta (2010) memaparkan beberapa kasus yang ada di Indonesia terkait peran *whistleblower*, tidak hanya di sektor swasta, namun juga sektor publik terkait korupsi. Misalnya Arifin Wardiyanto, melaporkan dugaan korupsi dalam urusan perizinan wartel di Yogyakarta pada tahun 1996; Maria Leonita melaporkan dugaan suap oleh Zainal Agus, Direktur Mahkamah Agung, pada tahun 2001; Khairiansyah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaporkan kasus suap yang akan diberikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas audit yang dilakukan BPK. Masih banyak kasus lainnya yang menunjukkan peran penting karyawan, auditor, pengacara, dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui. Namun nasib yang sama dialami para *whistleblower* tersebut, yaitu mereka dijebloskan ke dalam penjara, sementara kasus yang dilaporkan ditangani dalam waktu yang lama.

Tuannakotta (2010) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pemimpin organisasi kepada pemimpin organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Sedangkan individu yang melakukan *whistleblowing* disebut *whistleblower*. *Whistleblower* adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindak lanjuti.

Pelaporan oleh *whistleblower* biasanya dilakukan secara rahasia dengan menggunakan sistem *hotline* anonim. Salah satu kelemahan dari sistem *hotline* anonim ini adalah *whistleblower* dalam kebanyakan kasus mungkin tidak akan memberikan nama mereka ke *hotline* sehingga mustahil untuk mendapatkan klarifikasi informasi yang disampaikan atau untuk meminta tindak lanjut pertanyaan sehingga mengurangi efektifitas dari *hotline* (Near and Miceli, 1995). Untuk mendorong *whistleblower* untuk melaporkan *fraud* ke *hotline* Sonnier, Lassar, & Greene (2016) mengusulkan pertimbangan undang-undang yang akan melarang pengungkapan laporan, komunikasi, dan identitas pelapor dalam proses administrative. Undang-undang tersebut juga bisa melarang setiap anggota komite audit, pihak ketiga atau departemen pengelola *hotline*, dan karyawan dari departemen audit internal, untuk mengungkapkan kepada siapapun selain anggota komite audit.

Ketika *whistleblower* memberikan nama mereka ke *hotline* pelaporan, memungkinkan beresiko identitas mereka ditemukan oleh manajemen, terjadi ancaman kerja yang merugikan dan biaya pribadi yang dirasakan *whistleblower* sehingga resiko-resiko tersebut akan mengurangi kemungkinan karyawan untuk melaporkan *fraud*. Seorang pegawai mungkin segan untuk melaporkan kecurangan akuntansi atau hal lain karena takut pembalasan manajemen (SEC, 2011). Karyawan mungkin takut penemuan identitas mereka oleh manajemen jika mereka *whistleblow* akan mengancam pekerjaan mereka, seperti dipecat, diturunkan pangkatnya, atau tidak dipromosikan. Demikian juga, kekhawatiran tentang penemuan identitas *whistleblower* oleh manajemen dan takut ancaman

kerja yang merugikan akan meningkatkan biaya pribadi yang dirasakan dari pengungkapan rahasia.

Oleh karena itu perlu adanya hak perlindungan bagi *whistleblower* yang melaporkan suatu tindakan *fraud* ke *hotline* internal perusahaan yang melarang pengungkapan laporan *whistleblower*, informasi yang diberikan oleh *whistleblower*, dan identitas *whistleblower* kepada orang lain selain anggota komite audit perusahaan, departemen audit internal perusahaan, dan pihak ketiga yang dikontrak untuk mengelola *hotline*.

Pada penelitian sebelumnya oleh Sonnier, Lassar, & Greene (2016), peneliti tersebut meneliti terkait hak perlindungan dan pencantuman identitas menggunakan variabel niat untuk melaporkan, penemuan identitas, ancaman kerja, dan biaya pribadi. Pada penelitian Sonnier, Lassar, & Greene menggunakan instrumen yang meneliti niat untuk *whistleblow*. Penelitian tersebut menghasilkan, bahwa kemungkinan pelaporan meningkat secara signifikan dan biaya pribadi yang dirasakan secara signifikan menurun ketika *whistleblower* diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dengan mendapatkan hak perlindungan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hak perlindungan yang melindungi karyawan perusahaan yang melaporkan suatu tindakan *fraud* ke *hotline* dan kewajiban pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline* terhadap niat untuk melaporkan *fraud* oleh *whistleblower*. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dimana penelitian sebelumnya juga menggunakan metode yang sama. Penelitian ini menggunakan sampel dari mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam

Indonesia Untuk pengujian analisis data peneliti menggunakan analisis yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah adanya hak perlindungan yang melindungi *whistleblower* dapat meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*?
2. Apakah kewajiban pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline* pelaporan dapat menurunkan niat untuk melaporkan kecurangan?
3. Apakah kewajiban pencantuman identitas dan adanya hak perlindungan bagi *whistleblower* dapat meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji apakah adanya hak perlindungan yang melindungi *whistleblower* dapat meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.
2. Menguji apakah kewajiban pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline* pelaporan dapat menurunkan niat untuk melaporkan kecurangan.

3. Menguji apakah kewajiban pencantuman identitas dan adanya hak perlindungan bagi *whistleblower* dapat meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi dan teori mengenai pencegahan kecurangan dan hak perlindungan bagi *whistleblower*.

1.5 SISTEMATIKA BAHASA

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi cara pengolahan data secara keseluruhan disertai dengan pembahasan berkaitan dengan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action*, dengan menambahkan konstruk yang belum ada dalam *Theory of Reasoned Action* yaitu persepsi kontrol atas perilaku. Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat hanya jika seseorang memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 1991). Konstruk ini ditambahkan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain, niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol perilaku dengan bersumber pada keyakinan terhadap kontrol tersebut.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Berdasarkan teori ini dapat diketahui bahwa niat terbentuk dari *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* yang dimiliki individu. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan evaluasi individu secara positif atau negatif terhadap benda, orang, institusi, kejadian, perilaku atau niat tertentu (Ajzen, 2005). Sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan perilaku tersebut. Apabila seseorang melakukan perilaku yang menghasilkan *outcome* positif, maka individu tersebut memiliki sikap positif, begitu juga sebaliknya.

Norma subjektif (*subjective norm*) merupakan faktor diluar individu yang menunjukkan persepsi seseorang tentang perilaku yang dilaksanakan. *Subjective norms* tidak hanya ditentukan *referent*, tetapi juga *motivation to comply*. Apabila individu yakin bahwa *referent* menyetujui dirinya melaksanakan suatu perilaku dan termotivasi mengikuti suatu perilaku, maka individu tersebut akan merasakan adanya tekanan sosial untuk melakukannya, begitu juga sebaliknya (Ajzen, 2005). Persepsi kemampuan mengontrol perilaku (*perceived behavioral control/PBC*), adalah persepsi atau kemampuan diri individu mengenai kontrol individu tersebut atas suatu perilaku. PBC ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu atau dipengaruhi pengalaman dari orang lain. Individu akan melakukan suatu perilaku jika telah mengevaluasi perilaku tersebut secara positif, adanya tekanan sosial untuk melakukan perilaku, serta individu percaya dan memiliki kesempatan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).

Niat untuk melakukan perilaku (*intention*), merupakan komponen diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Tingkah laku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga faktor lain seperti ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005). Niat terbentuk dari *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* yang dimiliki individu terhadap suatu perilaku. Perilaku (*behavior*), merupakan tindakan nyata yang dilakukan seseorang berdasarkan niat yang ada (Jogiyanto, 2007). Secara umum, teori ini menyatakan bahwa semakin besar dukungan sikap dan norma subyektif berhubungan dengan perilaku, maka semakin kuat intensi seseorang untuk

melakukan perilaku. Semakin besar persepsi kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat intensi seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991 dalam Respati, 2010).

2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)

Kesalahan atas laporan keuangan dapat dibedakan atas kesalahan yang terjadi akibat kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Faktor yang membedakan antara kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasari kesalahan tersebut. Kekeliruan merupakan kesalahan yang tidak disengaja, pada pihak lain kecurangan merupakan tindakan yang disengaja (IAI, 2001)

SAS No.99 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan. Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa kecurangan pelaporan keuangan adalah suatu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material.

PricewaterhouseCoopers (PWC, 2009) melaporkan bahwa sebesar 30% responden dari survei yang dilakukan menyatakan pernah mengalami kecurangan dalam 12 bulan terakhir. Dari tiga jenis kecurangan yang terjadi seperti kecurangan akuntansi, suap dan korupsi, serta penyelewengan aset, jenis kecurangan yang banyak terjadi adalah kecurangan akuntansi yang mengalami peningkatan hampir empat kali lipat. KPMG (2009) juga melaporkan bahwa 65% dari eksekutif yang disurvei menyebutkan bahwa kecurangan merupakan risiko yang sering terjadi pada perusahaan mereka. Meskipun kasus kecurangan sering

terjadi, namun seringkali auditor internal maupun eksternal tidak mampu mengungkapkan kecurangan tersebut. Hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2010) menunjukkan bahwa internal audit hanya mampu mendeteksi kecurangan sebanyak 13,7% kasus, sedangkan auditor eksternal hanya mampu mendeteksi 4,2% dari total kasus kecurangan yang dilaporkan. Mengingat sulitnya untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi, maka perilaku *whistleblowing* dianggap merupakan metode yang paling efektif untuk melaporkan kecurangan yang terjadi.

2.1.3 Whistleblowing

The 2012 report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse yang dikeluarkan oleh *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE 2012) menemukan bahwa organisasi rata-rata kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya akibat *fraud* setiap tahunnya. *The Gross World Product* diterapkan pada tahun 2011, lebih dari US\$ 3,5 triliun hilang karena kecurangan setiap tahunnya (ACFE 2012). Laporan ini juga menunjukkan bahwa adanya aktivitas pelaporan kecurangan menjadi metode paling umum dalam deteksi *fraud* awal yang kemudian muncul dengan istilah yang disebut *whistleblowing*. Istilah ini berasal dari kebiasaan polisi di Inggris yang biasa meniupkan peluit ketika terjadi kejadian kriminal, suara peluit tersebut juga akan menarik perhatian polisi yang lain dan juga orang-orang disekitarnya. Definisi standar dari istilah *Whistleblowing* telah dipakai dalam banyak penelitian. Menurut Near dan Miceli (1985), *Whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi tentang praktek-praktek ilegal yang dilakukan pihak lain yang dapat menyebabkan

tindakan lanjutan. Tindakan *Whistleblowing* sesungguhnya bukan untuk menyebabkan kerusakan pada organisasi tapi lebih kepada melakukan fasilitas terhadap setiap laporan yang menjurus kepada tindakan yang mungkin akan merugikan organisasi (Miceli & Near, 1988).

Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor (Dworkin & Near 1997).

Beberapa manfaat dari penyelenggaraan *Whistleblowing* antara lain (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008):

1. Tersedianya sarana penyampaian informasi penting dan kritis bagi organisasi kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Menurunkan niat untuk melakukan pelanggaran karena adanya sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat public.
5. Menurunkan tingkat resiko yang dihadapi dari organisasi akibat adanya pelanggaran baik dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.

6. Mengurangi biaya dalam menangani kerugian akibat adanya pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi organisasi.

2.1.4 Hak Perlindungan bagi *Whistleblower*

Whistleblowing adalah usaha untuk mencapai sebuah tujuan ekonomik dan sosial, sehingga pelakunya mengharapkan dukungan oleh berbagai pihak agar tujuan tersebut tercapai. Namun kenyataan yang sering terjadi adalah mereka akan mendapat banyak ancaman seperti retaliasi (Arnold and Ponemon, 1991).

Hak perlindungan bagi *whistleblower* melarang pengungkapan laporan *whistleblower*, informasi yang diberikan oleh *whistleblower*, dan identitas pelapor kepada orang lain selain anggota komite audit perusahaan, karyawan departemen audit internal perusahaan, dan pihak ketiga dikontrak untuk mengelola *hotline*.

Sonnier, Lassar, & Greene (2016) menyatakan tujuan dari hak perlindungan bagi *whistleblower* akan mengaktifkan komite audit untuk memperoleh nama *whistleblower* untuk lebih melengkapi pelaporan guna menyelidiki tuduhan kesalahan. Menurut Sonnier, Lassar, & Greene (2016) *whistleblower* yang memberikan nama mereka ke *hotline* pelaporan kemungkinan akan melihat risiko yang lebih besar dari identitas mereka ditemukan oleh manajemen daripada ketika nama mereka tidak disediakan. Selain itu, mereka mungkin akan melihat risiko yang lebih besar dari ancaman pekerjaan yang merugikan dan merasakan biaya pribadi yang lebih tinggi akibat dari pelaporan.

Hasil penelitian yang dilakukan Sonnier, Lassar, & Greene (2016) menunjukkan bahwa kemungkinan pelaporan meningkat secara signifikan dan biaya pribadi yang dirasakan secara signifikan menurun ketika *whistleblower*

diperlukan untuk memberikan namanya ke *hotline* diberikan hak istimewa pembuktian. Studi ini menginformasikan kebijakan tentang dampak bahwa hak yang melindungi pelapor akan memiliki kemungkinan pelaporan dan memungkinkan tahap untuk eksplorasi lebih lanjut dari kelayakan seperti penerapan hak perlindungan.

2.1.5 Biaya Pribadi (*Personal Cost*)

Dalam Akuntansi Sumber Daya Manusia *Personal cost accounting* adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi proses manajemen pribadi dalam pencarian dan pengembangan sumberdaya manusia (Naukoko, 2014). Sedangkan menurut Schutlz et al., (1993) *personal cost of reporting* adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan atau balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan *wrongdoing*. Anggota organisasi yang dimaksud dapat saja berasal dari manajemen, atasan, atau rekan kerja. Beberapa pembalasan dapat terjadi dalam bentuk tidak berwujud (intangible), misalnya penilaian kinerja yang tidak seimbang, hambatan kenaikan gaji, pemutusan kontrak kerja, atau dipindahkan ke posisi yang tidak diinginkan (Curtis, 2006).

Personal cost merupakan salah satu alasan utama yang menyebabkan seseorang tidak ingin melaporkan dugaan pelanggaran karena mereka meyakini bahwa laporan mereka tidak akan ditindak lanjuti, mereka akan mengalami retaliasi, atau manajemen tidak akan melindungi mereka dari ancaman retaliasi, khususnya dalam jenis pelanggaran yang melibatkan para manajer (Brown, 2008 dalam Rodiyah, 2015). Graham dalam Zhuang

(2003) mengemukakan bahwa *personal cost* yang paling dipertimbangkan adalah pembalasan dari orang-orang dalam organisasi yang menentang tindakan pelaporan. *Personal cost* berkurang ketika bantuan dalam persiapan dan presentasi argumen kritis tersedia dan diberikan perlindungan pembalasan. Sifat dan besarnya retaliasi atau sanksi yang dikenakan oleh manajemen terhadap *whistleblower* merupakan faktor penentu yang paling signifikan bagi keputusan *whistleblower* dalam mengkomunikasikan pelanggaran organisasional.

Personal cost bukan hanya dampak tindakan balas dendam dari pelaku kecurangan, melainkan juga keputusan menjadi pelapor dianggap sebagai tindakan tidak etis, misalnya melaporkan kecurangan atasan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena menantang atasan (Sabang, 2013 dalam Rodiyah, 2015). Pengaruh persepsi keseriusan pelanggaran, *Personal cost reporting*, tanggung jawab untuk melapor, dan komitmen profesi terhadap niat pelaporan pelanggaran oleh para auditor menyatakan bahwa pria dan wanita berbeda dalam mempertimbangkan penurunan *Personal cost* (Kaplan dan Whitecotton, 2001).

2.1.6 Pengungkapan identitas *whistleblower* ke *hotline*

Hotline pelaporan adalah salah satu saluran yang paling sering disarankan untuk mendeteksi *fraud*. Studi telah menunjukkan bahwa layanan *hotline* merupakan mekanisme pelaporan yang efektif dan berkontribusi untuk mengembangkan sistem *whistleblowing* dengan efektif mendorong pelaporan *fraud* (Asgary dan Mitschow 2002). *Hotline* memungkinkan karyawan untuk melaporkan kecurangan secara rahasia sebagai kenyamanan mereka dan dapat

melapor tindakan *fraud* yang mereka ketahui kapan saja (Asgary dan Mitschow 2002). Saluran *hotline* memungkinkan pelaporan *fraud* secara anonim, ini akan membantu untuk mengurangi risiko yang dirasakan atas pembalasan kepada pelapor. Salah satu kelemahan dari sistem *hotline* anonim ini adalah *whistleblower* dalam kebanyakan kasus mungkin tidak akan memberikan nama mereka ke *hotline* sehingga mustahil untuk mendapatkan klarifikasi informasi yang disampaikan atau untuk meminta tindak lanjut pertanyaan sehingga mengurangi efektifitas dari *hotline* (Near and Miceli, 1995).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut Keberadaan hak perlindungan bagi *whistleblower* dan pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*.

Menurut Sonnier, Lassar, & Greene (2016) ketika seorang karyawan berniat untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya cenderung melihat konsekuensi pribadi yang merugikan akibat dari pelaporan. Dibawah hukum saat ini laporan, komunikasi, dan identitas seorang *whistleblower* tidak dilindungi oleh hak perlindungan, sehingga sangat mungkin bahwa *whistleblower* akan memilih untuk tidak mengungkap identitasnya mengingat akan merasakan biaya pribadi yang potensial terkait penyelidikan lebih lanjut atas laporan (Sonnier, Lassar, & Greene, 2016).

Review dari penelitian terdahulu yaitu dari jurnal Sonnier, Lassar, & Greene (2016), *An Examination of The Impact of An Evidentiary Privilege Protecting Corporate Whistleblowers on Intention to Report Wrongdoing*. Menurut penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan pelaporan meningkat secara signifikan dan biaya pribadi yang dirasakan secara signifikan menurun ketika *whistleblower* diperlukan untuk memberikan namanya ke *hotline* diberikan hak perlindungan. Studi ini menginformasikan kebijakan tentang dampak bahwa hak yang melindungi pelapor akan memiliki pada kemungkinan pelaporan dan memungkinkan tahap untuk eksplorasi lebih lanjut dari kelayakan seperti penerapan hak perlindungan. Penelitian terdahulu terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, menemukan sebuah perbuatan curang dalam lingkungan kerja sebenarnya dapat menimbulkan respon yang berbeda dari hipotesis dalam percobaan. Keterbatasan kedua berkaitan dengan penggunaan mahasiswa sarjana akuntansi di sebuah universitas besar bagian tenggara Amerika Serikat sebagai peserta. Keterbatasan ketiga berkaitan dengan jenis perbuatan curang yang digunakan dalam penelitian.

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Dampak Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

Dalam memutuskan apakah seseorang akan melaporkan kecurangan, sejumlah peneliti mempertimbangkan manfaat dari *whistleblowing* terhadap biaya pribadi yang dirasakan termasuk pembalasan oleh organisasinya, seperti intimidasi, pencemaran nama baik, kehilangan pekerjaan, penurunan pangkat, dan

dampak negatif lainnya yang menyangkut karir seseorang (Keil et al, 2010). Adanya hak perlindungan bagi karyawan yang melaporkan *fraud* yang melarang pengungkapan laporan *whistleblower*, informasi yang diberikan *whistleblower*, dan identitas pelapor kepada orang lain selain anggota komite audit perusahaan, karyawan departemen audit internal perusahaan, dan pihak ketiga yang dikontrak untuk mengelola *hotline* dianggap dapat menurunkan biaya pribadi pelaporan yang ditanggung dan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud* (Sonnier, Lassar, & Greene, 2016).

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

2.3.2 Dampak Pencantuman Identitas *Whistleblower* ke *Hotline* terhadap Niat Untuk Melaporkan *Fraud*

Tujuan dari sistem *whistleblowing* sebagai alat deteksi *fraud* dan untuk mencegah kesalahan pada risiko deteksi (Sonnier, Lassar, & Greene, 2016). Sistem pelaporan anonim bagi *whistleblower* dimaksudkan untuk meningkatkan kesediaan karyawan untuk melaporkan *fraud* dengan mengurangi kemungkinan bahwa manajemen akan menemukan identitas *whistleblower* (SEC, 2003). Kemampuan *whistleblower* untuk melaporkan secara anonym meningkatkan kemungkinan pelaporan dan meningkatkan manfaat dari pelaporan terhadap biaya pribadi yang dirasakan (Keil et al, 2010).

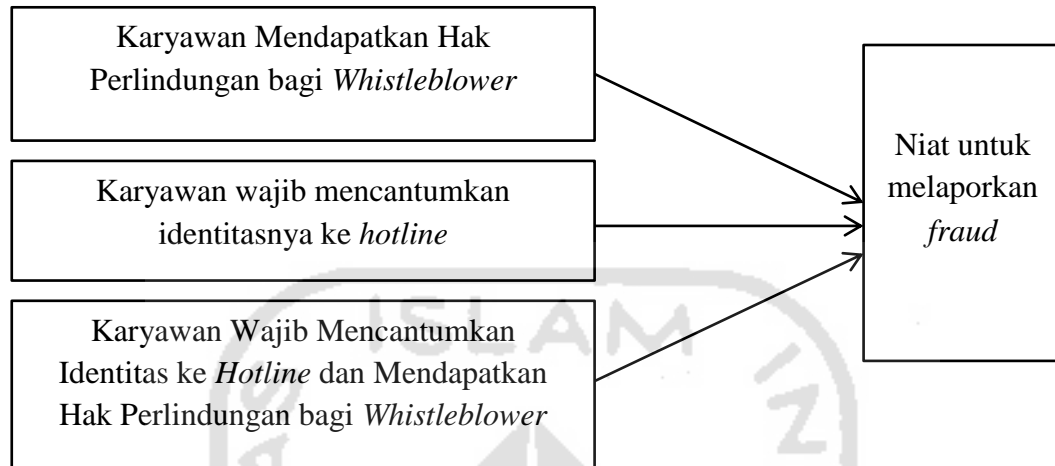
Ketika *whistleblower* memberikan identitas mereka ke *hotline* pelaporan kemungkinan akan menganggap resiko yang lebih besar dari identitasnya diketahui oleh manajemen daripada mereka tidak memberikan identitasnya ke *hotline*. Selain itu, mereka juga akan menganggap risiko yang lebih besar dari saksi pelaporan dan merasakan biaya pribadi yang lebih besar yang mungkin akan ditanggung

Oleh karnanya diperlukan suatu perlindungan bagi seorang pengungkap kecurangan agar *whistleblower* tersebut merasa aman mendapatkan hak-hak perlindungannya ketika *whistleblower* berniat untuk melaporkan *fraud* yang dilihatnya dan diwajibkan untuk mencantumkan identitas.

Berdasarkan teori tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H2a : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* akan mengurangi niat untuk melaporkan *fraud*.
- H2b : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

2.4 KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1

Pada gambar diatas menunjukkan seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan bagi *whistleblower* akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud* dan seorang karyawan yang diwajibkan mencantumkan identitas ke *hotline* akan mengurangi niat untuk melaporkan *fraud* serta seorang karyawan yang diwajibkan mencantumkan identitas ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan bagi *whistleblower* akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metoda eksperimen untuk menguji hubungan antara perlindungan kepada *whistleblower* terhadap niat untuk melaporkan kecurangan. Penelitian eksperimen adalah desain riset untuk menginvestigasi suatu fenomena dengan cara merekayasa keadaan atau kondisis lewat prosedur tertentu dan mngamati hasil perekayasaan tersebutserta intepretasinya (Ertambang, 2013). Peneliti akan menggunakan jenis eksperimen laboratorium. Dalam penelitian laboratorium, control dan manipulasi paling baik dilakukan dalam situasi buatan (Uma Sekaran, 2007). Control dan manipulasi paling baik dilakukan dalam situasi buatan , dimana pengaruh dapat diuji.

Eksperimen akan dilakukan dengan memberikan kasus terhadap mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah audit. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan izin dari dosen pengampu mata kuliah pada setiap kelas yang akan digunakan sebagai eksperimen.

Dalam penelitian ini subjek tidak akan mengetahui hipotesis dan subjek akan diberikan arahan. Subjek hanya akan menyelesaikan setiap kasus yang diberikan tanpa ada gangguan sehingga akan meningkatkan validitas penelitian. Peneliti akan membimbing subjek dalam menyelesaikan kasus yang ada dalam instrumen.

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di 6 kelas perkuliahan, kelas pertama yaitu kelas Audit Forensik dengan dosen pengampu Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA. pada tanggal 16 Mei 2017, kelas kedua yaitu kelas Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Ayu Chairina Laksmi S.E., MAC., M.Res., Ak., Ph.D. pada tanggal 16 Mei 2017, kelas ketiga yaitu kelas Akuntansi Keprilakuan dengan dosen pengampu Ataina Hidayati Dra.,M.Si., Ph.D., Ak. pada tanggal 17 Mei 2017, kelas keempat yaitu kelas Akuntansi Keprilakuan dengan dosen pengampu Mahmudi ,S.E., M.Si. pada tanggal 17 Mei 2017, Kelas kelima yaitu kelas Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA. pada tanggal 18 Mei 2017, dan kelas keenam yaitu kelas Audit Forensik dengan dosen pengampu Sigit Handoyo, S.E., M.Bus. Pada tanggal 18 Mei 2017.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah lulus pada matakuliah Pengauditan.

3.2.2 Sampel

Penelitian ini menggunakan 206 partisipan yang dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama diberi dua treatment yaitu *whistleblower* diberikan hak perlindungan dan *whistleblower* tidak mendapatkan hak perlindungan.

Kelompok kedua diberi dua treatment yaitu *whistleblower* wajib mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan *whistleblower* tidak wajib mencantumkan identitasnya ke *hotline*. Kelompok ketiga diberikan dua treatment yaitu *whistleblower* wajib mencantumkan identitas dan diberi hak perlindungan, dan *whistleblower* wajib mencantumkan identitas dan tidak diberikan hak perlindungan.

3.3 DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL

3.3.1 Variabel Dependent

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu, niat untuk melaporkan *fraud*. Niat untuk melakukan perilaku (*intention*), merupakan komponen diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Tingkah laku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga faktor lain seperti ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dua variabel independen dalam penelitian ini adalah hak perlindungan bagi *whistleblower* dan pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline*.

Hak perlindungan bagi *whistleblower* melarang pengungkapan laporan *whistleblower*, informasi yang diberikan oleh *whistleblower*, dan identitas pelapor

kepada orang lain selain anggota komite audit perusahaan, karyawan departemen audit internal perusahaan, dan pihak ketiga dikontrak untuk mengelola *hotline*. Sonnier, Lassar, & Greene (2016) menyatakan tujuan dari hak perlindungan bagi *whistleblower* akan mengaktifkan komite audit untuk memperoleh nama *whistleblower* untuk lebih melengkapi pelaporan guna menyelidiki tuduhan kesalahan.

Menurut Sonnier, Lassar, & Greene (2016) *whistleblower* yang memberikan nama mereka ke *hotline* pelaporan kemungkinan akan melihat risiko yang lebih besar dari identitas mereka ditemukan oleh manajemen daripada ketika nama mereka tidak disediakan. Selain itu, mereka mungkin akan melihat risiko yang lebih besar dari ancaman pekerjaan yang merugikan dan merasakan biaya pribadi yang lebih tinggi akibat dari pelaporan.

3.4 PENGUMPULAN DATA EKSPERIMEN

Instrumen eksperimen meliputi materi kasus dan daftar pertanyaan keseluruhan instrumen, pengukuran dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian adalah berupa kasus dan setelah kasus siap peserta diberikan pertanyaan sesuai skenario yang dibuat oleh peneliti. Setiap partisipan akan diberi peran dan diberikan kondisi yang telah dimanipulasi peneliti.

3.5 DESAIN EKSPERIMEN

Dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 3 kelompok, yang mana setiap kelompok memiliki *treatment* yang berbeda. Partisipan akan dimintai penilaian mengenai kasus tersebut dengan memberikan pernyataan ya dan tidak.

3.5.1 Dampak Hak Perlindungan terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

Tabel 3.1

Skopa Informasi	Seorang karyawan	
	Mendapatkan hak perlindungan bagi <i>whistleblower</i>	Tidak mendapatkan hak perlindungan bagi <i>whistleblower</i>
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	Sell 1	Sell 2

Sell 1 = Seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan bagi *whistleblower*/ Niat untuk melaporkan *fraud*.

Sell 2 = Seorang karyawan yang tidak mendapatkan hak perlindungan bagi *whistleblower*/ Niat untuk melaporkan *fraud*.

3.5.2 Dampak Pencantuman Identitas *Whistleblower* ke *Hotline* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

Tabel 3.2

Skopa Informasi	Seorang karyawan	
	Diwajibkan mencantumkan identitas ke <i>hotline</i>	Tidak diwajibkan mencantumkan identitas ke <i>hotline</i>
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	Sell 1	Sell 2

Sell 1 = Seorang karyawan ketika diwajibkan mencantumkan identitas ke *hotline*/ Niat untuk melaporkan *fraud*

Sell 2 = Seorang karyawan ketika tidak diwajibkan mencantumkan identitas ke *hotline*/ Niat untuk melaporkan *fraud*.

3.5.3 Dampak Pencantuman Identitas *Whistleblower* ke *Hotline* dan Hak Perlindungan terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

Tabel 3.3

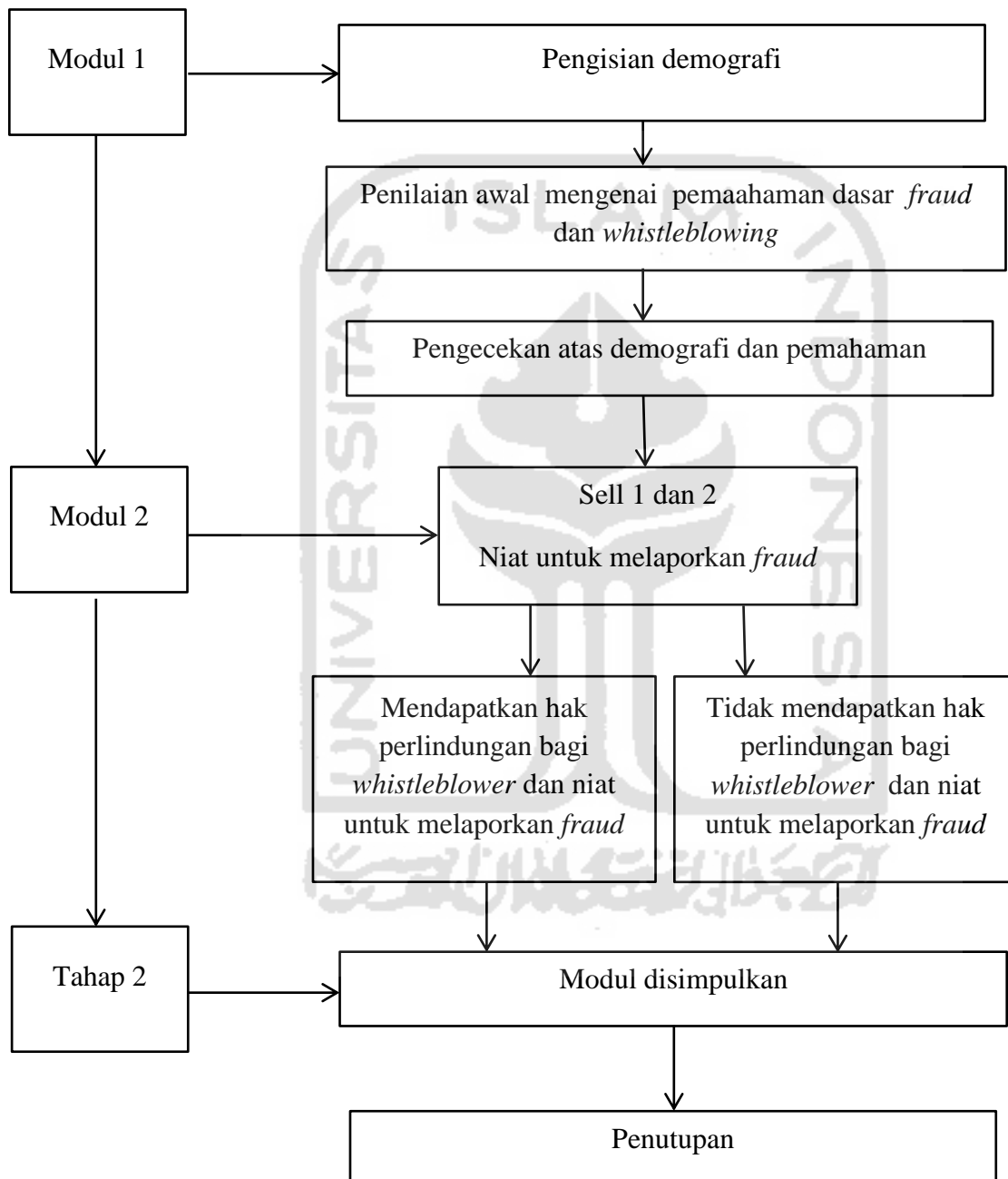
	Seorang karyawan	
	Skopa Informasi	Diwajibkan mencantumkan identitas ke <i>hotline</i> dan Mendapatkan Hak Perlindungan
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	Sell 1	Sell 2

Sell 1 = Seorang karyawan ketika diwajibkan mencantumkan identitas ke *hotline*/ Niat untuk melaporkan *fraud*

Sell 2 = Seorang karyawan ketika tidak diwajibkan mencantumkan identitas ke *hotline*/ Niat untuk melaporkan *fraud*.

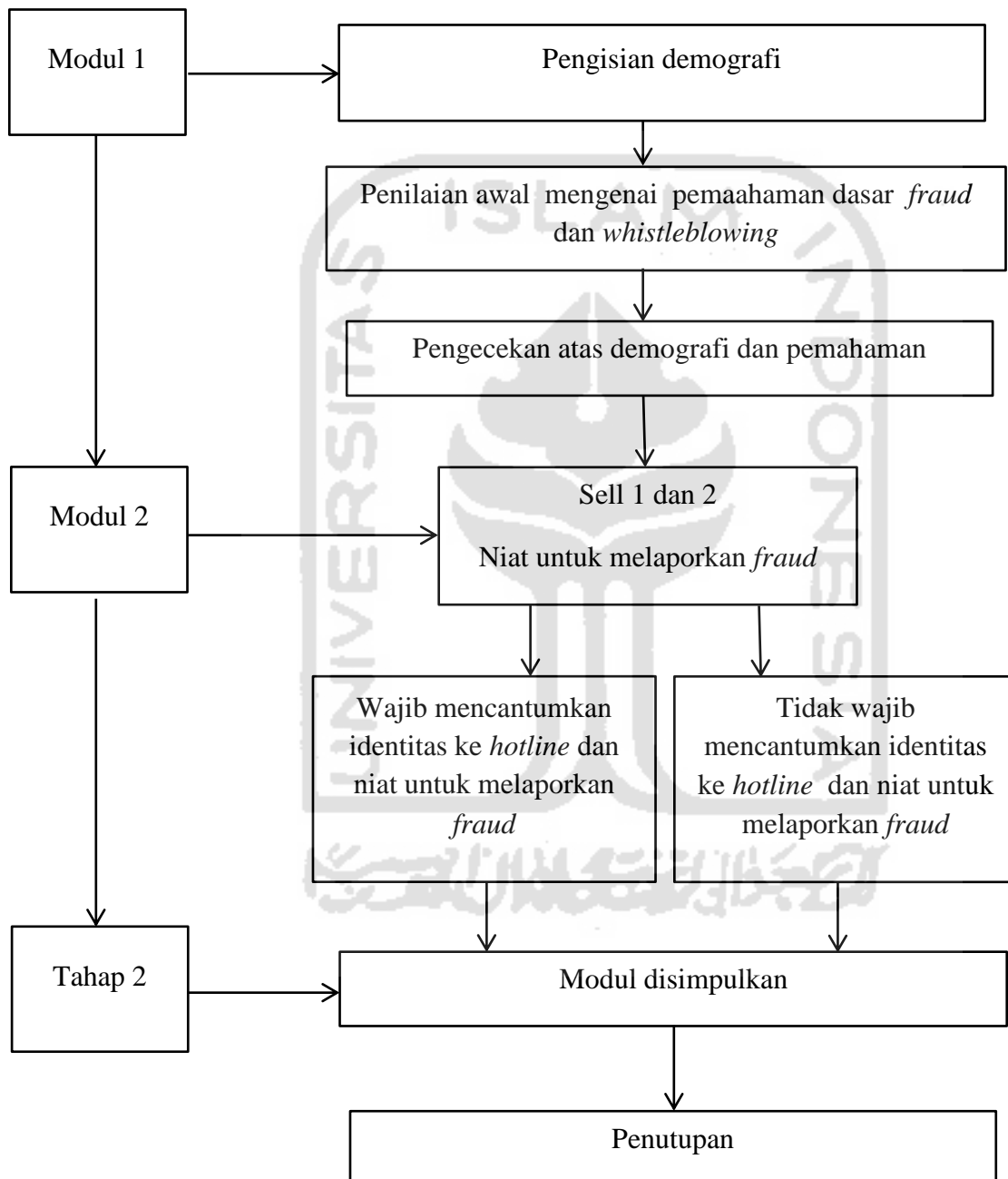
**Prosedur Eksperimen Menguji Pengaruh Hak Perlindungan bagi
Whistleblower terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud***

Gambar 3.1



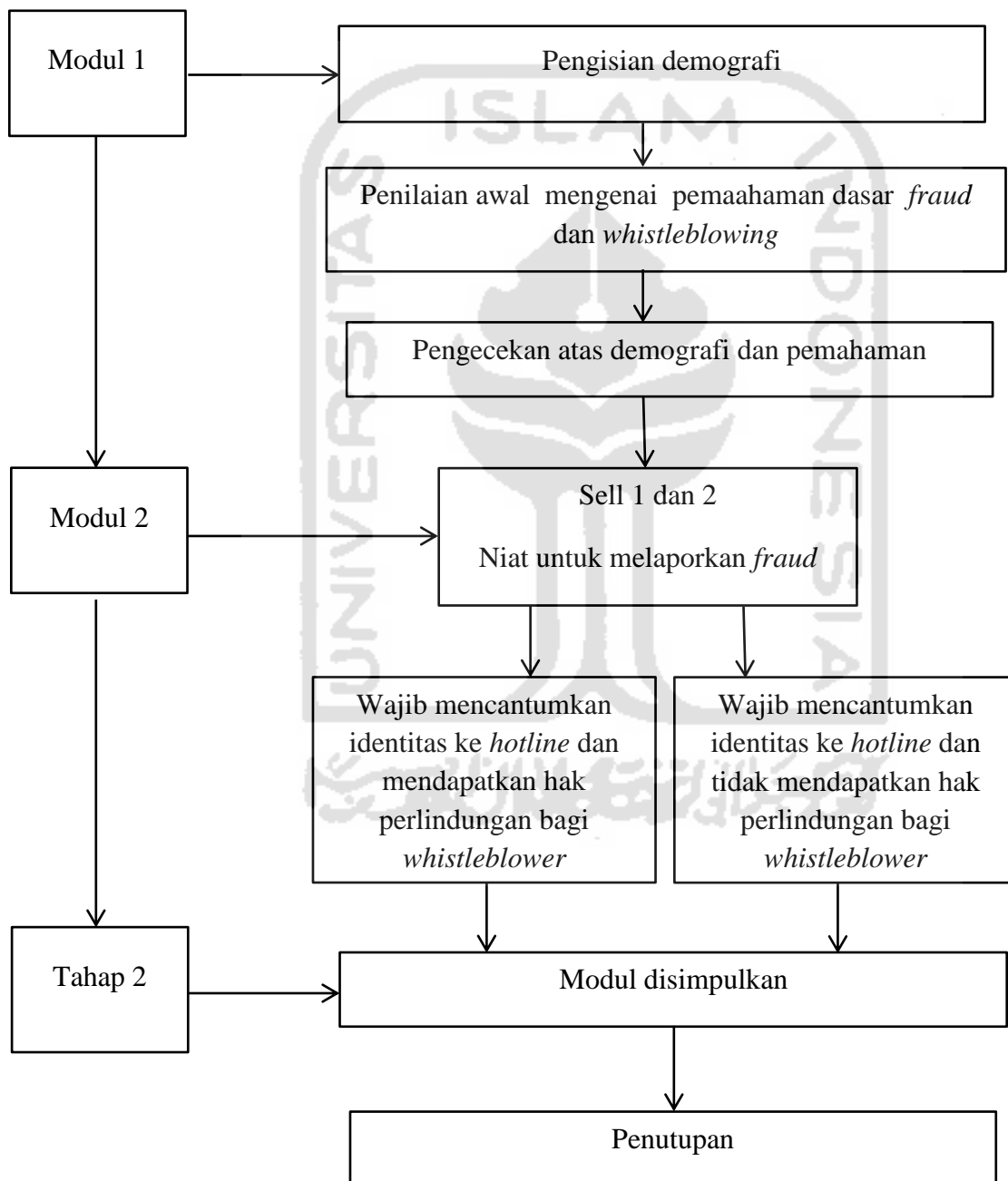
**Prosedur Eksperimen Menguji Pengaruh Pencantuman Identitas
Whistleblower ke *Hotline* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud***

Gambar 3.2



**Prosedur Eksperimen Menguji Pencantuman Identitas dan Hak
Perlindungan *Whistleblower* Niat untuk Melaporkan *Fraud*.**

Gambar 3.3



3.6 HIPOTESIS OPERASIONAL

H₁ : Seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

H₀₁ : Seorang karyawan yang tidak mendapatkan perlindungan akan menurunkan niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{a1} : Seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{2a} : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* akan mengurangi niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{02a} : Seorang karyawan ketika tidak diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{a2a} : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* akan mengurangi niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{2b} : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{02b} : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan tidak mendapatkan hak perlindungan akan menurunkan niat untuk melaporkan *fraud*.

H_{a2b} : Seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*.

3.7 ALAT ANALISA DATA

3.7.1 Analisis Statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode untuk menggambarkan data menjadi informasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini berupa penjelasan melalui rata-rata (mean) dan standard deviasi untuk menginterpretasikan hasil analisis data.

3.7.2 Uji Validitas

Kegunaan uji validitas adalah untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika pertanyaan pada instrument mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2011). Suatu instrumen dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$.

3.7.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu instrumen yang merupakan indikator atau variabel. Menurut Ghozali (2011), suatu instrumen dapat dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban partisipan terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian reliabilitas dengan teknik *one shot* atau pengukuran sekali saja. Dalam penggunaan teknik ini, pengukurannya hanya sekali dan hasilnya dapat dibandingkan dengan pertanyaan yang lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan (Ghozali, 2011). Suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 .

3.7.4 Pengecekan Manipulasi

Pengecekan manipulasi adalah untuk mengecek apakah manipulasi terhadap pengaruh hak perlindungan bagi *whistleblower* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Uji *paired sample test* merupakan uji perbedaan rata-rata dua sample berpasangan yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk dua sampel independen yang berpasangan.

3.7.5 Pengujian Hipotesis

Uji *paired sample test* digunakan untuk menguji setiap hipotesis, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dampak ada tidaknya hak perlindungan bagi *whistleblower* dan wajib tidaknya pencantuman identitas *whistleblower* ke *hotline* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*, serta dampak kewajiban pencantuman identitas ke *hotline* dengan ada tidaknya hak perlindungan bagi *whistleblower* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Uji ini digunakan untuk melihat secara keseluruhan respon partisipan terhadap

pernyataan atau kasus yang diberikan melalui suatu manipulasi yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN EKSPERIMEN

Partisipan berjumlah 206 orang yang sudah mengambil matakuliah pengauditan. Peneliti mengambil sampel pada 6 kelas. Setiap kelas mendapatkan perlakuan yang berbeda dan dibagi menjadi dua kelompok untuk pelaksanaan manipulasi dengan membagikan 2 instrumen perkelasnya. Waktu penelitian setiap kelas sekitar 10-20 menit. Peneliti menggunakan 6 kelas, kelas pertama yaitu kelas Audit Forensik dengan dosen pengampu Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA. pada tanggal 16 Mei 2017, kelas kedua yaitu kelas Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Ayu Chairina Laksmi S.E., MAC., M.Res., Ak., Ph.D. pada tanggal 16 Mei 2017, kelas ketiga yaitu kelas Akuntansi Keprilakuan dengan dosen pengampu Ataina Hidayati Dra.,M.Si., Ph.D., Ak. pada tanggal 17 Mei 2017, kelas keempat yaitu kelas Akuntansi Keprilakuan dengan dosen pengampu Mahmudi ,S.E., M.Si. pada tanggal 17 Mei 2017, Kelas kelima yaitu kelas Metodologi Penelitian Akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Kumalahadi, M.Si, Ak, CA, CPA. pada tanggal 18 Mei 2017, dan kelas keenam yaitu kelas Audit Forensik dengan dosen pengampu Sigit Handoyo, S.E., M.Bus. Pada tanggal 18 Mei 2017.

4.2. ANALISIS DATA

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang telah mengambil dan lulus mata kuliah Pengauditan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Instrumen yang disebar berjumlah 206 lembar dan didistribusikan ke setiap kelas. Berikut adalah hasil dari pengumpulan data di 6 kelas yang dijadikan sebagai sampel:

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI	Total	%
Kuisisioner yang disebar	35	43	40	28	38	34	218	100%
Kuisisioner yang terkumpul	35	43	40	28	38	34	218	100%
Kuisisioner yang tidak dapat digunakan	0	0	0	3	1	8	12	5.5%
Kuisisioner yang memenuhi syarat	35	43	40	25	37	26	206	94.5%

Dari table 4.1 menunjukkan bahwa penyebaran kuisisioner yang diadakan pada keenam kelas, dari semua kelas menunjukkan tingkat *usable response rate* 94,5%. Terdapat 5,5% kuisisioner tidak dapat digunakan, hal ini terjadi karena

instrumen tersebut menghasilkan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan peneliti atau tidak memenuhi syarat, sehingga peneliti memutuskan untuk tidak menggunakan 12 instrumen tersebut.

4.2.2 Analisis Deskriptif Responden

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Peengauditan. Dengan harapan mahasiswa telah memahami tentang prosedur audit. Mahasiswa yang telah lulus audit telah memahami dasar audit seperti prosedur audit, standart audit, dan objek yang di audit. Dalam menguji pengetahuan dasar audit dapat disimpulkan mahasiswa telah memahami pengetahuan dasar mengenai audit

4.2.2.1 Angkatan

Data partisipan berdasarkan angkatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2 karakteristik partisipan berdasarkan angkatan

Angkatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2013	23	11.2	11.2	11.2
	2014	183	88.8	88.8	100.0
	Total	206	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data diatas partisipan berjumlah 206 orang, dengan partisipan dari angkatan 2013 sebanyak 23 orang dengan presentase 11,2% dan angkatan 2014 sebanyak 183 orang dengan presentase 88.8%.

4.2.2.2 Jenis Kelamin

Data partisipan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Partisipan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	72	35.0	35.0	35.0
	Perempuan	134	65.0	65.0	100.0
	Total	206	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data diatas partisipan berjumlah 206 orang. Partisipan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 72 orang dengan presentase 35% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 134 orang dengan presentase 65%.

4.2.2.3 Usia

Data partisipan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.4 Karakteristik partisipan berdasarkan usia

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	10	4.9	4.9	4.9
	20	80	38.8	38.8	43.7
	21	97	47.1	47.1	90.8
	22	18	8.7	8.7	99.5
	23	1	.5	.5	100.0
	Total	206	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data diatas partisipan berjumlah 206 orang dengan partisipan berusia 19 tahun sebanyak 10 orang dengan presentase 4,9%, usia 20 tahun

sebanyak 80 orang dengan presentase 38,8%, usia 21 tahun sebanyak 97 orang dengan presentase 47,1%, usia 22 tahun sebanyak 18 Orang denga presentase 8,7%, dan usia 23 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 0,5%.

4.2.2.4 Lulus Pengauditan

Data partisipan yang telah lulus mata kuliah Pengauditan adalah sebagai berikut:

Table 4.5 Daftar Partisipan Lulus Pengauditan

Lulus_pengauditan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sudah lulus	206	100.0	100.0	100.0

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data diatas partisipan memiliki presentase lulus mata kuliah pengauditan sebesar 100%, artinya seluruh partisipan yang berjumlah 206 orang telah lulus mata kuliah pengauditan.

4.2.2.5 Pengetahuan Dasar *Fraud* dan *Whistleblowing*

Tabel 4.6 Tingkat pemahaman terhadap dasar audit

No	Pengetahuan dasar <i>fraud</i> dan <i>whistleblowing</i>	Jawaban		
		A	B	C
P1	Apa itu kecurangan (<i>fraud</i>)?			
	a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan			
	b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain	0	100%	0
	c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum			
P2	Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?			
	a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan	0	0	100%
	b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi			
	c. Tekanan,peluang dan rasionalisasi			
P3	Apa itu <i>whistleblowing</i> ?			
	a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.			
	b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.	100%	0	0
	c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.			

P4	<i>Whistleblower</i> adalah :	100%	0	0
	a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya			
	b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan			
	c. Orang yang melakukan manipulasi			
P5	Komponen <i>whistleblowing</i> , adalah...	100%	0	0
	a. Pihak yang melapor adanya <i>fraud</i> , laporan mengenai <i>fraud</i> , pihak yang diduga melakukan <i>fraud</i> .			
	b. Pihak yang diduga melakukan <i>fraud</i> , pihak yang melaporkan adanya <i>fraud</i> , pihak pendengar laporan.			
	c. Pihak yang melaporkan adanya <i>fraud</i> , laporan mengenai <i>fraud</i> , pihak pendengar laporan.			

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan jawaban partisipan, dapat disimpulkan bahwa partisipan memahami pengetahuan dasar audit terutama mengenai *fraud* dan *whistleblowing*. Dari kelima pertanyaan partisipan dapat menjawab 100% dengan benar. Berdasarkan data tersebut mahasiswa secara keseluruhan dapat menjawab dengan benar, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan mahasiswa memahami pengetahuan dasar tentang audit.

4.2.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan bahwa alat ukur berupa butir pertanyaan dalam instrumen mampu mengukur dengan tepat sesuatu yang diukur.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen 1 dan 2

Keterangan	Ada hak perlindungan			Tidak ada hak perlindungan		
	Korelasi	Signifikansi	Hasil	Korelasi	Signifikansi	Hasil
Indikator 1	0.343	0.041	Valid	0.371	0.026	Valid
Indikator 2	0.623	0.000	Valid	0.596	0.000	Valid
Indikator 3	0.698	0.000	Valid	0.702	0.000	Valid
Indikator 4	0.664	0.000	Valid	0.717	0.000	Valid
Indikator 5	0.673	0.000	Valid	0.734	0.000	Valid
Indikator 6	0.626	0.000	Valid	0.747	0.000	Valid
Indikator 7	0.548	0.001	Valid	0.591	0.000	Valid

Sumber : Data diolah, 2017

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Instrumen 3 dan 4

Keterangan	Wajib mencantumkan identitas			Tidak wajib mencantumkan identitas		
	Korelasi	Signifikansi	Hasil	Korelasi	Signifikansi	Hasil
Indikator 1	0.472	0.005	Valid	0.406	0.017	Valid
Indikator 2	0.653	0.000	Valid	0.810	0.000	Valid
Indikator 3	0.746	0.000	Valid	0.766	0.000	Valid

Indikator 4	0.809	0.000	Valid	0.766	0.000	Valid
Indikator 5	0.851	0.000	Valid	0.816	0.000	Valid
Indikator 6	0.785	0.000	Valid	0.774	0.000	Valid
Indikator 7	0.643	0.000	Valid	0.640	0.000	Valid

Sumber : Data diolah, 2017

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Instrumen 5 dan 6

Keterangan	Wajib mencantumkan identitas dan mendapat hak perlindungan			Wajib mencantumkan identitas dan tidak mendapat hak perlindungan		
	Korelasi	Signifikansi	Hasil	Korelasi	Signifikansi	Hasil
Indikator 1	0.403	0.020	Valid	0.362	0.039	Valid
Indikator 2	0.496	0.003	Valid	0.754	0.000	Valid
Indikator 3	0.644	0.000	Valid	0.579	0.000	Valid
Indikator 4	0.613	0.000	Valid	0.664	0.000	Valid
Indikator 5	0.862	0.000	Valid	0.765	0.000	Valid
Indikator 6	0.677	0.000	Valid	0.802	0.000	Valid
Indikator 7	0.740	0.000	Valid	0.509	0.002	Valid

Sumber : Data diolah, 2017

4.2.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi jawaban partisipan dari setiap butir pertanyaan pada instrumen. Pengujian reliabilitas pada penelitian

ini dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas

Keterangan	<i>Cronbach Alpha</i>	N of Items	Hasil
Instrumen 1 dan 2			
• Ada hak perlindungan	0.722	7	Reliabel
• Tidak ada hak perlindungan	0.753	7	Reliabel
Instrumen 3 dan 4			
• Wajib mencantumkan identitas	0.827	7	Reliabel
• Tidak wajib mencantumkan identitas	0.841	7	Reliabel
Instrumen 5 dan 6			
• Wajib mencantumkan identitas dan mendapat hak perlindungan	0.760	7	Reliabel
• Wajib mencantumkan identitas dan tidak mendapat hak perlindungan	0.756	7	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2017

4.2.5 Pengecekan Manipulasi

Pengecekan manipulasi dilakukan pada setiap hasil manipulasi yaitu pada instrumen pertama dan kedua: ada hak perlindungan bagi *whistleblower* dan tidak

ada hak perlindungan bagi *whistleblower* pada variabel niat untuk melaporkan *fraud*.. Lalu, pada instrumen ketiga dan keempat: wajib mencantumkan identitas dan tidak wajib mencantumkan identitas pada variabel niat untuk melaporkan *fraud*. Pada instrumen kelima dan keenam: mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan serta mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan pada variabel niat untuk melaporkan *fraud*. Hasilnya ditunjukkan oleh tabel 4.11 berikut:

<i>Treatment</i> (Manipulasi)	Perbandingan Rata-Rata	P_Value
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (Ada hak perlindungan & tidak ada hak perlindungan)	1.889	0.000
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (Wajib mencantumkan identitas & Tidak wajib mencantumkan identitas)	1.256	0.042
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (Diwajibkan mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan & Diwajibkan mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan)	2.000	0.000

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan data yang diambil terkait penilaian terhadap akuntan dengan derajat keyakinan 95% untuk manipulasi pada instrumen pertama dan kedua yaitu parisipan yang diberi manipulasi ada hak perlindungan dan tidak ada hak perlindungan bagi *whistleblower* menghasilkan perbedaan rata-rata sebesar 1,889 dengan signifikansi (2-tailed) 0.000 untuk variabel niat untuk melaporkan. Angka ini menunjukkan bahwa manipulasi pada instrumen pertama dan kedua berhasil.

Pengecekan kedua yaitu pada manipulasi instrumen ketiga dan keempat, partisipan diberi manipulasi wajib mencantumkan identitas dan tidak wajib mencantumkan identitas menghasilkan perbedaan rata-rata sebesar 1,265 dan signifikansi (2-tailed) 0.042 untuk variabel niat untuk melaporkan. Angka ini menunjukkan bahwa manipulasi pada instrumen ketiga dan keempat berhasil.

Pengecekan ketiga yaitu pada manipulasi instrumen kelima dan keenam, partisipan diberi manipulasi wajib mencantumkan identitas & ada hak perlindungan dan wajib mencantumkan identitas & tidak ada hak perlindungan menghasilkan perbedaan rata-rata sebesar 2,000 dan signifikansi (2-tailed) 0.000 untuk variabel niat untuk melaporkan. Angka ini menunjukkan bahwa manipulasi pada instrumen kelima dan keenam berhasil.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Pengujian Hipotesis 1

Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1 yang menyatakan seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*. Untuk membuktikan hipotesis ini diuji dengan analisis statistik uji *Paired sample t Test* pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan program *IBM SPSS Statistics 24*, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis 1

Variabel	Rata-rata	Signifikansi	$\alpha= 5\%$
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (ada hak perlindungan)	2.67	0.000	0.05
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (tidak ada hak perlindungan)	4.56		

Sumber : Data diolah, 2017

Table 4.12 dapat dilihat bahwa rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang yang mendapatkan hak perlindungan yaitu 2.67 dan rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang tidak mendapatkan hak perlindungan yaitu 4.56. Rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang tidak mendapatkan hak perlindungan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang mendapatkan hak perlindungan. Selanjutnya hasil uji signifikansi dengan *paired sample t test* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata penilaian niat untuk melaporkan *fraud*, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan seorang karyawan yang mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud* terbukti atau dapat diterima.

4.2.6.2 Pengujian Hipotesis 2a

Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 2a yang menyatakan seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* akan mengurangi niat untuk melaporkan *fraud*. Untuk membuktikan hipotesis ini diuji dengan analisis statistik uji *Paired sample t Test* pada taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan program *IBM SPSS Statistics 24*, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis 2a

Variabel	Rata-rata	Signifikansi	$\alpha= 5\%$
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (Wajib mencantumkan identitas)	4.09	0.042	0.05
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (Tidak wajib mencantumkan identitas)	2.82		

Sumber : Data diolah, 2017

Table 4.13 dapat dilihat bahwa rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang diwajibkan mencantumkan identitas yaitu 4,09. dan rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang tidak diwajibkan mencantumkan identitas yaitu 2.82. Rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang diwajibkan mencantumkan identitas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang tidak diwajibkan mencantumkan identitas. Selanjutnya hasil uji signifikansi dengan *paired sample t test* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,042, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,005. Berdasarkan hasil pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan niat untuk melaporkan *fraud*, sehingga hipotesis 2a yang menyatakan seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* akan mengurangi niat untuk melaporkan *fraud*. dapat diterima.

4.2.6.3 Pengujian Hipotesis 2b

Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 2b yang menyatakan seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*. Untuk membuktikan hipotesis ini diuji dengan analisis statistik uji *Paired sample t Test* pada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan program *IBM SPSS Statistics 24*, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis 2b

Variabel	Rata-rata	Signifikansi	$\alpha= 5\%$
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (wajib mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan)	2.61	0.000	0.05
Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> (wajib mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan)	4.61		

Sumber : Data diolah, 2017

Table 4.14 dapat dilihat bahwa rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang wajib mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan yaitu 2.61 dan rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang wajib mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan yaitu 4.61. Rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang wajib mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata niat untuk melaporkan *fraud* yang wajib mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan. Selanjutnya hasil uji

signifkansi dengan *paired sample t test* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,005. Berdasarkan hasil pengujian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan niat untuk melaporkan *fraud*, sehingga hipotesis 2b yang menyatakan seorang karyawan ketika diwajibkan untuk mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud* dapat diterima.

4.3. PEMBAHASAN

Hipotesis pertama memprediksi hubungan hak perlindungan bagi *whistleblower* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Hasil penelitian ini menjelaskan seorang karyawan yang melaporkan tindakan *fraud* melalui *hotline* yang mendapatkan hak perlindungan akan meningkatkan niat untuk melaporkan *fraud*. Hipotesis penelitian ini terbukti dan menghasilkan hasil yang searah dengan penelitian yang dilakukan Sonnier, Lassar, & Greene (2016).

Hipotesis kedua mempresiksi hubungan kewajiban *whistleblower* mencantumkan identitasnya ke *hotline* terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Hipotesis penelitian ini terbukti kewajiban *whistleblower* mencantumkan identitas ke *hotline* berpengaruh terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Sonnier, Lassar, & Greene (2016) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara pencantuman nama terhadap pencantuman identitas, biaya pribadi, dan niat untuk melapor. Hipotesis kedua selanjutnya memprediksi hubungan kewajiban pencantuman identitas dan hak perlindungan terhadap niat untuk melaporkan *fraud*. Hipotesis ini terbukti dan

menghasilkan hasil yang searah dengan penelitian yang dilakukan Sonnier, Lassar, & Greene (2016).



BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hak perlindungan dan pencantuman identitas terhadap niat untuk melaporkan *fraud* pada sebuah eksperimen laboratorium.

Penelitian eksperimen ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 206 mahasiswa, dimana seluruh partisipan telah lulus mata kuliah pengauditan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Niat untuk melaporkan *fraud* akan meningkat ketika *whistleblower* mendapatkan hak perlindungan .
2. Niat untuk melaporkan *fraud* akan berkurang ketika *whistleblower* diwajibkan untuk mencantumkan identitas ke *hotline* perlporan.
3. Niat untuk melaporkan *fraud* meningkat ketika *whistleblower* diwajibkan mencantumkan identitasnya ke *hotline* dan mendapatkan hak perlindungan bagi *whistleblower*.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel untuk membuat ruang lingkup penelitian ini lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden agar hasil penelitian bisa ditarik kesimpulannya secara general.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar memberikan suatu manipulasi yang lebih nyata terhadap partisipan. Mengingat keterbatasan penelitian ini menggunakan partisipan yang berasal dari mahasiswa yang belum memiliki pengalaman yang sesungguhnya sebagai seorang akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 50, No. 2, pp. 179-211.
- Ajzen, Icek. 2005. *Laws of human behavior: symmetry, compatibility, and attitude behavior correspondence*. in a. Beauducel, B. Biehl, M. Bosniak, W. Conrad, G. Schonberger, & D. Wagener (Eds.), *Multivariate Research Strategies* (pp. 3-19). Aachen, Germany: Shaker Verlag.
- Arnold, D., dan Ponemon, L. (1991). Internal auditors perceptions of *whistleblowing* and the influence of moral reasoning: An experiment. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol 10. Pp 1–15.
- Asgary, N., & Mitschow, M. C. (2002). Toward a model for international business ethics. *Journal of Business Ethics*, 36, 239–246.
- Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). 2012. Report to the Nations on Occupational *Fraud* and Abuse. Austin, TX: ACFE.
- Curtis, Mary B. 2006. Are Audit-Related Ethical Decisions Dependent Upon Mood? *Journal of business ethics*, 68 (2), 191-209.
- Dworkin, T. M. & Near, J. P. (1997). A better statutory approach to *whistleblowing*. *Business Ethics Quarterly*, 7(1), 1-16
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2007. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kaplan, D. & Whitecotton, S. M. (2001). *An examination of auditors' reporting intentions when another auditor is offered client employment*. *Auditing*.
- Keil, M., Tiwana, A., Sainsbury, R. & Sneha, S. (2010). *Toward a theory of whistleblowing intentions: A benefit-to-cost differential perspective*. *Decision Sciences*, 41 (4), 787-812
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistle Blowing System-WBS)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Miceli, M. P. and Near, J. P. 1988. *Individual and Situational Correlates of Whistle-Blowing*. *Personnel psychology*, 41 (2), 267-281.
- Nahartyo, Ertambang. 2013. *Desain Dan Implementasi Riset Eksperimen*. Edisi ke 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Naukoko, Princilvanno Andreas. "Akuntansi Sumber Daya Manusia". Manado: e-journal, Vol.9 N0.3, Universitas Sam Ratulangi, 2014.
- Near, J. P. & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistleblowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1-16
- Near, J. P. & Miceli, M. P. (1995). Effective whistle-blowing. *The Academy of Management Review*, 20(3), 679-708
- Rodiyah, Syaifa. 2015. *Pengaruh Sifat Machiavellian, Lingkungan Etika dan Pribadi Cost terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Schultz, J. J., Johnson, D. A., Morris, D. & Dyrnes, S. (1993). An investigation of the reporting of questionable acts in an international setting. *Journal of Accounting Research*.
- Securities and Exchange Commission (SEC), April 25, 2003 (effective date). *Standards relating to listed company audit committees*. Received at <http://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm>
- Securities and Exchange Commission (SEC), May 25, 2011 (rule date). Implementation of provisions of Section 21F of the Securities Exchange Act of 1934. Retrieved at <http://www.sec.gov/rules/final/2011/34-64545.pdf>
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for bussiness*. Salemba Empat Jakarta.
- Sonnier, B.M., Lassar, W.M. & Greene, E. 2016. An examination of the impact of an evidentiary privilege protecting corporate whistleblowers on intention to report wrongdoing. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy* 17 (2):287-331.
- Tuannakotta, Theodorus M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zhuang, Jinyun. 2013. *Whistleblowing & Peer Reporting: A Cross-Cultural Comparison of Canadians and Chinese*. Tesis Magister Sains. Canada: Univercity or Lethbridge.



LAMPIRAN 1

Kuisisioner Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

INSTRUMEN PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Angkatan :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : tahun
5. Sudah pernah mengambil matakuliah pengauditan : Sudah / Belum

PENGANTAR SIMULASI

Dibawah ini terdapat sebuah kasus *fraud*. Dalam kasus tersebut anda menempati posisi sebagai *seorang akuntan* anda dimohon untuk

- Membaca dan memahami pendahuluan
- Membaca dan memahami kasus
- Mengisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dan kondisi yang diajukan

Anda diminta untuk menjawab sesuai persepsi anda. Saya menjamin kerahasiaan seluruh identitas yang anda berikan

PENGETAHUAN DASAR *FRAUD* DAN *WHISTLEBLOWING*

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat.

1. Apa itu kecurangan (*fraud*)?
 - a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan
 - b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain
 - c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum

2. Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?
 - a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan
 - b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi
 - c. Tekanan,pejuang dan rasionalisasi
3. Apa itu *whistleblowing*?
 - a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.
 - c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.
4. *Whistleblower* adalah :
 - a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya
 - b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan
 - c. Orang yang melakukan manipulasi
5. Komponen *whistleblowing*, adalah...
 - a. Pihak yang melapor adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak yang diduga melakukan *fraud*.
 - b. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, pihak yang melaporkan adanya *fraud*, pihak pendengar laporan.
 - c. Pihak yang melaporkan adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak pendengar laporan.

LATAR BELAKANG

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan (Miceli *et al.*, 2008). Keberadaan *whistleblower* memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan (*fraud*) di perusahaan. Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, dan 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor.

KASUS

Asumsikan anda adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 5 tahun pada perusahaan go public. Anda terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran untuk pengadaan komputer. Komputer akan digunakan untuk kantor tempat Anda bekerja. Setelah bertemu kepala departemen anda dipanggil untuk mendiskusikan proyek tersebut. Kepala departemen meminta anda dan beberapa rekan kerja untuk meningkatkan nilai proyek (*mark-up*) dari 5 miliar rupiah menjadi 9 miliar rupiah. Anda tahu bahwa *mark-up* lebih besar dari harga total komputer. Namun, tindakan kepala departemen tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan korup.

Pada kondisi di bawah ini, silahkan melingkari nomor skala yang paling dekat menunjukkan preferensi/pendapat anda untuk alternatif yang diberikan:

KONDISI ADANYA HAK PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perusahaan tempat anda bekerja saat ini **menerapkan sistem *hotline* pelaporan yang memberikan hak perlindungan bagi *whistleblower***. Dimana hak perlindungan tersebut melarang pengungkapan informasi yang diberikan oleh *whistleblower* dan identitas pelapor kepada pihak lain selain anggota komite audit.

1. Saya akan melaporkan tindakan korupsi (*mark-up*) yang dilakukan kepala departemen ke *hotline* pelaporan.

Ya melaporkan

Tidak melaporkan

←—————●—————→

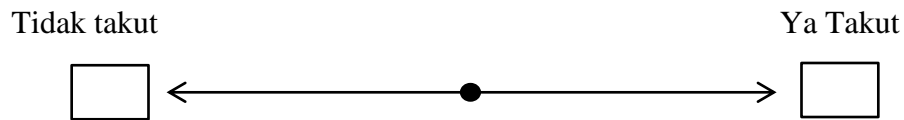
2. Saya merasa takut identitas saya diketahui oleh pihak manajemen jika melaporkan kecurangan.

Tidak takut

Ya Takut

←—————●—————→

3. Saya merasa takut jika melaporkan akan berpengaruh pada karir pekerjaan saya.



4. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan dipecat dari perusahaan.



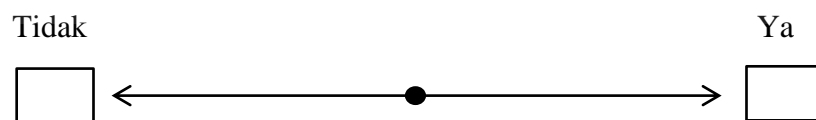
5. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya tidak dipromosikan naik jabatan.



6. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan mendapatkan sanksi pekerjaan dari perusahaan.



7. Jika Anda melaporkan tindak korupsi, anda akan mendapatkan risiko biaya pribadi seperti pembalasan atau balas dendam dari anggota organisasi.



LAMPIRAN 2

Kuisisioner Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

INSTRUMEN PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Angkatan :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : tahun
5. Sudah pernah mengambil matakuliah pengauditan : Sudah / Belum

PENGANTAR SIMULASI

Dibawah ini terdapat sebuah kasus *fraud*. Dalam kasus tersebut anda menempati posisi sebagai *seorang akuntan* anda dimohon untuk

- Membaca dan memahami pendahuluan
- Membaca dan memahami kasus
- Mengisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dan kondisi yang diajukan

Anda diminta untuk menjawab sesuai persepsi anda. Saya menjamin kerahasiaan seluruh identitas yang anda berikan

PENGETAHUAN DASAR *FRAUD* DAN *WHISTLEBLOWING*

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat.

1. Apa itu kecurangan (*fraud*)?
 - a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan
 - b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain
 - c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum

2. Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?
 - a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan
 - b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi
 - c. Tekanan,peluang dan rasionalisasi
3. Apa itu *whistleblowing*?
 - a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.
 - c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.
4. *Whistleblower* adalah :
 - a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya
 - b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan
 - c. Orang yang melakukan manipulasi
5. Komponen *whistleblowing*, adalah...
 - a. Pihak yang melapor adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak yang diduga melakukan *fraud*.
 - b. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, pihak yang melaporkan adanya *fraud*, pihak pendengar laporan.
 - c. Pihak yang melaporkan adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak pendengar laporan.

LATAR BELAKANG

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan (Miceli *et al.*, 2008). Keberadaan *whistleblower* memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan (*fraud*) di perusahaan. Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, dan 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor.

KASUS

Asumsikan anda adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 5 tahun pada perusahaan go public. Anda terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran untuk pengadaan komputer. Komputer akan digunakan untuk kantor tempat Anda bekerja. Setelah bertemu kepala departemen anda dipanggil untuk mendiskusikan proyek tersebut. Kepala departemen meminta anda dan beberapa rekan kerja untuk meningkatkan nilai proyek (*mark-up*) dari 5 miliar rupiah menjadi 9 miliar rupiah. Anda tahu bahwa *mark-up* lebih besar dari harga total komputer. Namun, tindakan kepala departemen tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan korup.

Pada kondisi di bawah ini, silahkan melingkari nomor skala yang paling dekat menunjukkan preferensi/pendapat anda untuk alternatif yang diberikan:

KONDISI TIDAK ADA HAK PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perusahaan tempat anda bekerja saat ini **tidak menerapkan sistem hotline pelaporan sehingga tidak ada hak perlindungan bagi whistleblower.** Dimana hak perlindungan tersebut melarang pengungkapan informasi yang diberikan oleh *whistleblower* dan identitas pelapor kepada pihak lain selain anggota komite audit.

1. Saya akan melaporkan tindakan korupsi (*mark-up*) yang dilakukan kepala departemen ke *hotline* pelaporan.

Ya melaporkan

Tidak melaporkan

←—————●—————→

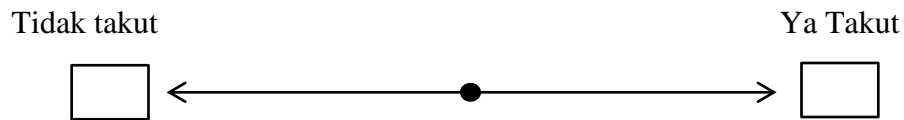
2. Saya merasa takut identitas saya diketahui oleh pihak manajemen jika melaporkan kecurangan.

Tidak takut

Ya Takut

←—————●—————→

3. Saya merasa takut jika melaporkan akan berpengaruh pada karir pekerjaan saya.



4. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan dipecat dari perusahaan.



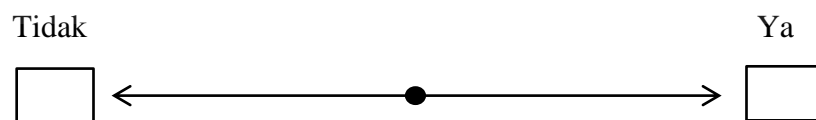
5. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya tidak dipromosikan naik jabatan.



6. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan mendapatkan sanksi pekerjaan dari perusahaan.



7. Jika Anda melaporkan tindak korupsi, anda akan mendapatkan risiko biaya pribadi seperti pembalasan atau balas dendam dari anggota organisasi.



LAMPIRAN 3

Kuisisioner Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

INSTRUMEN PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Angkatan :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : tahun
5. Sudah pernah mengambil matakuliah pengauditan : Sudah / Belum

PENGANTAR SIMULASI

Dibawah ini terdapat sebuah kasus *fraud*. Dalam kasus tersebut anda menempati posisi sebagai *seorang akuntan* anda dimohon untuk

- Membaca dan memahami pendahuluan
- Membaca dan memahami kasus
- Mengisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dan kondisi yang diajukan

Anda diminta untuk menjawab sesuai persepsi anda. Saya menjamin kerahasiaan seluruh identitas yang anda berikan

PENGETAHUAN DASAR *FRAUD* DAN *WHISTLEBLOWING*

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat.

1. Apa itu kecurangan (*fraud*)?
 - a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan
 - b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain
 - c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum

2. Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?
 - a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan
 - b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi
 - c. Tekanan,pejuang dan rasionalisasi
3. Apa itu *whistleblowing*?
 - a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.
 - c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.
4. *Whistleblower* adalah :
 - a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya
 - b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan
 - c. Orang yang melakukan manipulasi
5. Komponen *whistleblowing*, adalah...
 - a. Pihak yang melapor adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak yang diduga melakukan *fraud*.
 - b. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, pihak yang melaporkan adanya *fraud*, pihak pendengar laporan.
 - c. Pihak yang melaporkan adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak pendengar laporan.

LATAR BELAKANG

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan (Miceli *et al.*, 2008). Keberadaan *whistleblower* memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan (*fraud*) di perusahaan. Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, dan 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor.

KASUS

Asumsikan anda adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 5 tahun pada perusahaan go public. Anda terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran untuk pengadaan komputer. Komputer akan digunakan untuk kantor tempat Anda bekerja. Setelah bertemu kepala departemen anda dipanggil untuk mendiskusikan proyek tersebut. Kepala departemen meminta anda dan beberapa rekan kerja untuk meningkatkan nilai proyek (*mark-up*) dari 5 miliar rupiah menjadi 9 miliar rupiah. Anda tahu bahwa *mark-up* lebih besar dari harga total komputer. Namun, tindakan kepala departemen tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan korup.

Pada kondisi di bawah ini, silahkan melingkari nomor skala yang paling dekat menunjukkan preferensi/pendapat anda untuk alternatif yang diberikan:

KONDISI WHISTLEBLOWER WAJIB MENCANTUMKAN IDENTITAS KE HOTLINE PELAPORAN

Perusahaan tempat anda bekerja saat ini menerapkan sistem *hotline* pelaporan yang mana **pelapor diwajibkan untuk mengisi identitas (non-anonymous) ke *hotline* pelaporan.**

1. Saya akan melaporkan tindakan korupsi (*mark-up*) yang dilakukan kepala departemen ke *hotline* pelaporan.

Ya melaporkan

Tidak melaporkan

←—————●—————→

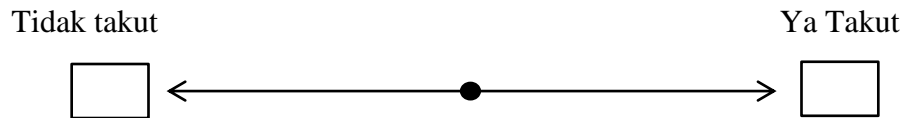
2. Saya merasa takut identitas saya diketahui oleh pihak manajemen jika melaporkan kecurangan.

Tidak takut

Ya Takut

←—————●—————→

3. Saya merasa takut jika melaporkan akan berpengaruh pada karir pekerjaan saya.



4. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan dipecat dari perusahaan.



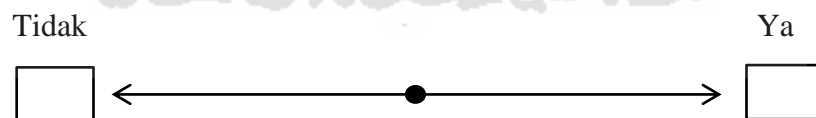
5. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya tidak dipromosikan naik jabatan.



6. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan mendapatkan sanksi pekerjaan dari perusahaan.



7. Jika Anda melaporkan tindak korupsi, anda akan mendapatkan risiko biaya pribadi seperti pembalasan atau balas dendam dari anggota organisasi.



LAMPIRAN 4

Kuisisioner Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

INSTRUMEN PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Angkatan :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : tahun
5. Sudah pernah mengambil matakuliah pengauditan : Sudah / Belum

PENGANTAR SIMULASI

Dibawah ini terdapat sebuah kasus *fraud*. Dalam kasus tersebut anda menempati posisi sebagai *seorang akuntan* anda dimohon untuk

- Membaca dan memahami pendahuluan
- Membaca dan memahami kasus
- Mengisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dan kondisi yang diajukan

Anda diminta untuk menjawab sesuai persepsi anda. Saya menjamin kerahasiaan seluruh identitas yang anda berikan

PENGETAHUAN DASAR *FRAUD* DAN *WHISTLEBLOWING*

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat.

1. Apa itu kecurangan (*fraud*)?
 - a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan
 - b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain
 - c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum

2. Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?
 - a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan
 - b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi
 - c. Tekanan,peluang dan rasionalisasi
3. Apa itu *whistleblowing*?
 - a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.
 - c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.
4. *Whistleblower* adalah :
 - a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya
 - b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan
 - c. Orang yang melakukan manipulasi
5. Komponen *whistleblowing*, adalah...
 - a. Pihak yang melapor adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak yang diduga melakukan *fraud*.
 - b. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, pihak yang melaporkan adanya *fraud*, pihak pendengar laporan.
 - c. Pihak yang melaporkan adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak pendengar laporan.

LATAR BELAKANG

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan (Miceli *et al.*, 2008). Keberadaan *whistleblower* memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan (*fraud*) di perusahaan. Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, dan 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor.

KASUS

Asumsikan anda adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 5 tahun pada perusahaan go public. Anda terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran untuk pengadaan komputer. Komputer akan digunakan untuk kantor tempat Anda bekerja. Setelah bertemu kepala departemen anda dipanggil untuk mendiskusikan proyek tersebut. Kepala departemen meminta anda dan beberapa rekan kerja untuk meningkatkan nilai proyek (*mark-up*) dari 5 miliar rupiah menjadi 9 miliar rupiah. Anda tahu bahwa *mark-up* lebih besar dari harga total komputer. Namun, tindakan kepala departemen tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan korup.

Pada kondisi di bawah ini, silahkan melingkari nomor skala yang paling dekat menunjukkan preferensi/pendapat anda untuk alternatif yang diberikan:

KONDISI WHISTLEBLOWER TIDAK WAJIB MENCANTUMKAN IDENTITAS KE *HOTLINE* PELAPORAN

Perusahaan tempat anda bekerja saat ini menerapkan sistem *hotline* pelaporan yang mana **pelapor tidak diwajibkan mencantumkan identitas (anonymous) ke *hotline* pelaporan.**

1. Saya akan melaporkan tindakan korupsi (*mark-up*) yang dilakukan kepala departemen ke *hotline* pelaporan.

Ya melaporkan

Tidak melaporkan

←—————●—————→

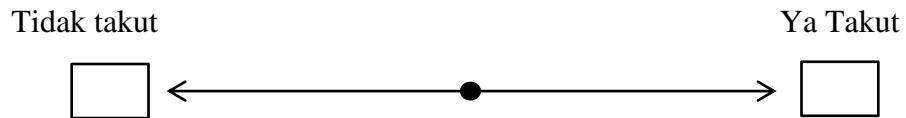
2. Saya merasa takut identitas saya diketahui oleh pihak manajemen jika melaporkan kecurangan.

Tidak takut

Ya Takut

←—————●—————→

3. Saya merasa takut jika melaporkan akan berpengaruh pada karir pekerjaan saya.



4. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan dipecat dari perusahaan.



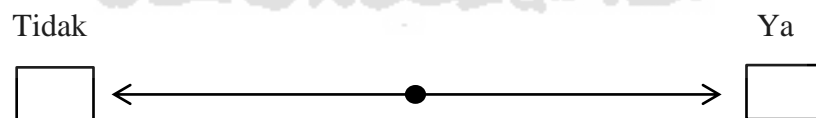
5. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya tidak dipromosikan naik jabatan.



6. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan mendapatkan sanksi pekerjaan dari perusahaan.



7. Jika Anda melaporkan tindak korupsi, anda akan mendapatkan risiko biaya pribadi seperti pembalasan atau balas dendam dari anggota organisasi.



LAMPIRAN 5

Kuisisioner Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

INSTRUMEN PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Angkatan :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : tahun
5. Sudah pernah mengambil matakuliah pengauditan : Sudah / Belum

PENGANTAR SIMULASI

Dibawah ini terdapat sebuah kasus *fraud*. Dalam kasus tersebut anda menempati posisi sebagai *seorang akuntan* anda dimohon untuk

- Membaca dan memahami pendahuluan
- Membaca dan memahami kasus
- Mengisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dan kondisi yang diajukan

Anda diminta untuk menjawab sesuai persepsi anda. Saya menjamin kerahasiaan seluruh identitas yang anda berikan

PENGETAHUAN DASAR *FRAUD* DAN *WHISTLEBLOWING*

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat.

1. Apa itu kecurangan (*fraud*)?
 - a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan
 - b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain
 - c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum

2. Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?
 - a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan
 - b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi
 - c. Tekanan,peluang dan rasionalisasi
3. Apa itu *whistleblowing*?
 - a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.
 - c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.
4. *Whistleblower* adalah :
 - a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya
 - b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan
 - c. Orang yang melakukan manipulasi
5. Komponen *whistleblowing*, adalah...
 - a. Pihak yang melapor adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak yang diduga melakukan *fraud*.
 - b. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, pihak yang melaporkan adanya *fraud*, pihak pendengar laporan.
 - c. Pihak yang melaporkan adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak pendengar laporan.

LATAR BELAKANG

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan (Miceli *et al.*, 2008). Keberadaan *whistleblower* memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan (*fraud*) di perusahaan. Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, dan 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor.

KASUS

Asumsikan anda adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 5 tahun pada perusahaan go public. Anda terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran untuk pengadaan komputer. Komputer akan digunakan untuk kantor tempat Anda bekerja. Setelah bertemu kepala departemen anda dipanggil untuk mendiskusikan proyek tersebut. Kepala departemen meminta anda dan beberapa rekan kerja untuk meningkatkan nilai proyek (*mark-up*) dari 5 miliar rupiah menjadi 9 miliar rupiah. Anda tahu bahwa *mark-up* lebih besar dari harga total komputer. Namun, tindakan kepala departemen tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan korup.

Pada kondisi di bawah ini, silahkan melingkari nomor skala yang paling dekat menunjukkan preferensi/pendapat anda untuk alternatif yang diberikan:

KONDISI *WHISTLEBLOWER* DIWAJIBKAN MENCANTUMKAN IDENTITAS KE *HOTLINE* PELAPORAN DAN ADA HAK PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Perusahaan tempat anda bekerja saat ini menerapkan sistem *hotline* pelaporan yang **mewajibkan *whistleblower* mencantumkan identitasnya ke *hotline* pelaporan dan perusahaan memberikan hak perlindungan bagi *whistleblower***. Dimana hak perlindungan tersebut melarang pengungkapan informasi yang diberikan oleh *whistleblower* dan identitas pelapor kepada pihak lain selain anggota komite audit.

1. Saya akan melaporkan tindakan korupsi (*mark-up*) yang dilakukan kepala departemen ke *hotline* pelaporan.

Ya melaporkan

Tidak melaporkan

←—————●—————→

2. Saya merasa takut identitas saya diketahui oleh pihak manajemen jika melaporkan kecurangan.

Tidak takut Ya Takut

←—————●————→

3. Saya merasa takut jika melaporkan akan berpengaruh pada karir pekerjaan saya.

Tidak takut Ya Takut

←—————●————→

4. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan dipecat dari perusahaan.

Tidak takut Ya Takut

←—————●————→

5. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya tidak dipromosikan naik jabatan.

Tidak takut Ya Takut

←—————●————→

6. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan mendapatkan sanksi pekerjaan dari perusahaan.

Tidak takut Ya Takut

←—————●————→

7. Jika Anda melaporkan tindak korupsi, anda akan mendapatkan risiko biaya pribadi seperti pembalasan atau balas dendam dari anggota organisasi.

Tidak Ya

←—————●————→

LAMPIRAN 6

Kuisisioner Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

INSTRUMEN PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Angkatan :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : tahun
5. Sudah pernah mengambil matakuliah pengauditan : Sudah / Belum

PENGANTAR SIMULASI

Dibawah ini terdapat sebuah kasus *fraud*. Dalam kasus tersebut anda menempati posisi sebagai *seorang akuntan* anda dimohon untuk

- Membaca dan memahami pendahuluan
- Membaca dan memahami kasus
- Mengisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dan kondisi yang diajukan

Anda diminta untuk menjawab sesuai persepsi anda. Saya menjamin kerahasiaan seluruh identitas yang anda berikan

PENGETAHUAN DASAR *FRAUD* DAN *WHISTLEBLOWING*

Saudara dimohon untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut saudara tepat.

1. Apa itu kecurangan (*fraud*)?
 - a. Suatu perilaku dimana seseorang melakukan kesalahan
 - b. Suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja memngambil manfaat atau secara tidak jujur atas orang lain
 - c. Suatu tindakan disengaja yang melanggar hukum

2. Diantara yang dibawah ini mana yang merupakan segitiga kecurangan ?
 - a. Korupsi, gaya hidup mewah dan tekanan
 - b. Peluang,rasionalisasi,dan kolusi
 - c. Tekanan,peluang dan rasionalisasi
3. Apa itu *whistleblowing*?
 - a. Kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan.
 - b. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk berbuat kecurangan.
 - c. Suatu perbuatan tidak jujur untuk menipu organisasi dan memanipulasi laporan keuangan.
4. *Whistleblower* adalah :
 - a. Orang yang melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi di lingkungan kerjanya
 - b. Orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan
 - c. Orang yang melakukan manipulasi
5. Komponen *whistleblowing*, adalah...
 - a. Pihak yang melapor adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak yang diduga melakukan *fraud*.
 - b. Pihak yang diduga melakukan *fraud*, pihak yang melaporkan adanya *fraud*, pihak pendengar laporan.
 - c. Pihak yang melaporkan adanya *fraud*, laporan mengenai *fraud*, pihak pendengar laporan.

LATAR BELAKANG

Whistleblowing merupakan kegiatan pengungkapan informasi oleh seseorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran atau kejahatan (Miceli *et al.*, 2008). Keberadaan *whistleblower* memegang peranan penting untuk mengungkapkan skandal keuangan (*fraud*) di perusahaan. Dalam tindakan *Whistleblowing* setidaknya terdapat 4 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut adalah 1) pihak yang melaporkan adanya kecurangan, 2) laporan mengenai kecurangan, 3) pihak yang diduga melakukan kecurangan, dan 4) pihak yang menampung laporan pelanggaran dari pelapor.

KASUS

Asumsikan anda adalah seorang akuntan yang telah bekerja selama 5 tahun pada perusahaan go public. Anda terlibat dalam sebuah proyek untuk membuat anggaran untuk pengadaan komputer. Komputer akan digunakan untuk kantor tempat Anda bekerja. Setelah bertemu kepala departemen anda dipanggil untuk mendiskusikan proyek tersebut. Kepala departemen meminta anda dan beberapa rekan kerja untuk meningkatkan nilai proyek (*mark-up*) dari 5 miliar rupiah menjadi 9 miliar rupiah. Anda tahu bahwa *mark-up* lebih besar dari harga total komputer. Namun, tindakan kepala departemen tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan korup.

Pada kondisi di bawah ini, silahkan melingkari nomor skala yang paling dekat menunjukkan preferensi/pendapat anda untuk alternatif yang diberikan:

KONDISI WHISTLEBLOWER WAJIB MENCANTUMKAN IDENTITAS KE HOTLINE PELAPORAN DAN TIDAK ADA HAK PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perusahaan tempat anda bekerja saat ini menerapkan sistem *hotline* pelaporan yang **mewajibkan *whistleblower* mencantumkan identitasnya ke *hotline* pelaporan namun perusahaan tidak memberikan hak perlindungan bagi *whistleblower***. Dimana hak perlindungan tersebut melarang pengungkapan laporan *whistleblower*, informasi yang diberikan oleh *whistleblower*, dan identitas pelapor kepada pihak lain selain anggota komite audit.

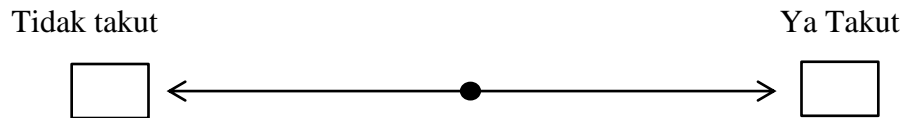
1. Saya akan melaporkan tindakan korupsi (*mark-up*) yang dilakukan kepala departemen ke *hotline* pelaporan.

Ya melaporkan

Tidak melaporkan

←—————●—————→

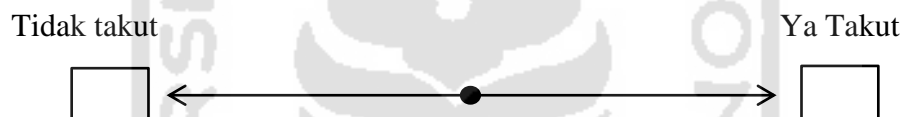
2. Saya merasa takut identitas saya diketahui oleh pihak manajemen jika melaporkan kecurangan.



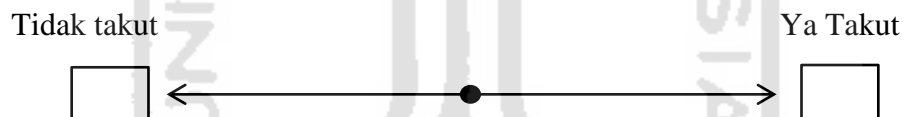
3. Saya merasa takut jika melaporkan akan berpengaruh pada karir pekerjaan saya.



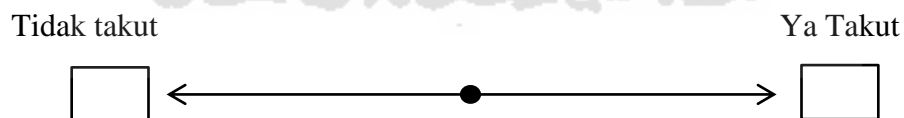
4. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan dipecat dari perusahaan.



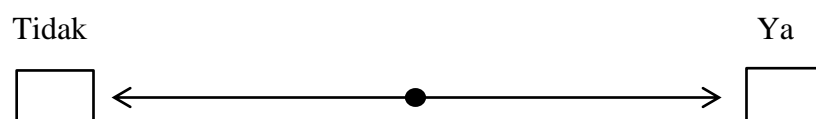
5. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya tidak dipromosikan naik jabatan.



6. Saya merasa takut jika mengungkap kecurangan saya akan mendapatkan sanksi pekerjaan dari perusahaan.



7. Jika Anda melaporkan tindak korupsi, anda akan mendapatkan risiko biaya pribadi seperti pembalasan atau balas dendam dari anggota organisasi.



Total_1	Pearson Correlation	.343*	.623**	.698**	.664**	.730**	.626**	.548**	1
	Sig. (2-tailed)	.041	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	7

Total_2	Pearson	.371 [*]	.596 ^{**}	.702 ^{**}	.717 ^{**}	.734 ^{**}	.747 ^{**}	.591 ^{**}	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.026	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	7

Total_3	Pearson	.472**	.653**	.746**	.809**	.851**	.785**	.649**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.827	7

Total_4	Pearson	.406 [*]	.810 ^{**}	.766 ^{**}	.766 ^{**}	.816 ^{**}	.774 ^{**}	.640 ^{**}	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.017	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.841	7

Total_5	Pearson	.403 [*]	.496 ^{**}	.644 ^{**}	.613 ^{**}	.862 ^{**}	.677 ^{**}	.740 ^{**}	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.020	.003	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	33	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	7

Total_6	Pearson	.362 [*]	.754 ^{**}	.579 ^{**}	.664 ^{**}	.765 ^{**}	.802 ^{**}	.509 ^{**}	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.039	.000	.000	.000	.000	.000	.002	
	N	33	33	33	33	33	33	33	33

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	33	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	33	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	8

LAMPIRAN 13

Hasil Pengujian Paired Sample T-Test

Pengaruh Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Ada hak perlindungan_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	2.67	36	2.000	.333
	Tidak ada hak perlindungan_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	4.56	36	2.090	.348

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Ada hak perlindungan_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> & Tidak ada hak perlindungan_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	36	.237	.164

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Ada hak perlindungan_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> - Tidak ada hak perlindungan_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	-1.889	2.527	.421	-2.744	-1.034	-4.484	35	.000

LAMPIRAN 14

Hasil Pengujian Paired Sample T-Test
Pengaruh Pencantuman Identitas ke *Hotline* Pelaporan terhadap Niat untuk
Melaporkan *Fraud*

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Wajib mencantumkan identitas_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	4.09	34	2.621	.450
	Tidak wajib mencantumkan identitas_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	2.82	34	2.430	.417

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Wajib mencantumkan identitas_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> & Tidak wajib mencantumkan identitas_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	34	.045	.799

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Wajib mencantumkan identitas_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i> - Tidak wajib mencantumkan identitas_Niat untuk melaporkan <i>fraud</i>	1.265	3.493	.599	.046	2.483	2.111	33	.042

LAMIRAN 15

Hasil Pengujian Paired Sample T-Test

Pengaruh Pencantuman Identitas *Whistleblower* ke *Hotline* Pelaporan dan Hak Perlindungan bagi *Whistleblower* terhadap Niat untuk Melaporkan *Fraud*

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Wajib mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan_Niat melaporkan <i>fraud</i>	2.61	33	2.164	.377
	Wajib mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan_Niat melaporkan <i>fraud</i>	4.61	33	2.106	.367

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Wajib mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan_Niat melaporkan <i>fraud</i> & Wajib mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan_Niat melaporkan <i>fraud</i>	33	.116	.521

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Wajib mencantumkan identitas dan ada hak perlindungan_Niat melaporkan <i>fraud</i> - Wajib mencantumkan identitas dan tidak ada hak perlindungan_Niat melaporkan <i>fraud</i>	-2.000	2.839	.494	-3.007	-.993	-4.046	32	.000